

# LAPORAN PEMANTAUAN TREN VONIS 2021

RENDAHNYA HUKUMAN PENJARA DAN  
ANJLOKNYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA

# DAFTAR ISI PAPARAN

## 01 Pendahuluan

Pemaparan situasi terkini pemberantasan korupsi di Indonesia

## 02 Tujuan dan Metodologi

Penjelasan mengenai tujuan dilakukannya pemantauan persidangan perkara korupsi dilengkapi dengan metodologi penulisan

## 03 Analisis pemantauan

Analisis temuan dalam pemantauan persidangan perkara korupsi sepanjang tahun 2021

## 04 Kesimpulan

Penjabaran poin-poin kesimpulan dari temuan pemantauan persidangan perkara korupsi sepanjang tahun 2021

## 05 Rekomendasi

Penjabaran rekomendasi perbaikan bagi pemangku kepentingan dalam pemantauan persidangan perkara korupsi sepanjang tahun 2021



TREN VONIS 2021

# PENDAHULUAN

## Carut Marut Pemberantasan Korupsi

Korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, untuk itu dibutuhkan penanganan yang eksta untuk menciptakan efek jera bagi pelaku. Namun, belakangan waktu terakhir kondisi pemberantasan korupsi kian mengendur. Salah satu yang cukup mengkhawatirkan adalah kondisi persidangan perkara korupsi. Alih-alih menghukum berat, yang terjadi justru sebaliknya, fenomena diskon hukuman pelaku korupsi semakin mengemuka. Pada akhirnya, makna keadilan sendiri dipertanyakan, milik terdakwa atau korban?

NEXT



“

*Koruptor untung,  
rakyat buntung*

”

# TUJUAN DAN METODOLOGI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Memandang :
- bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
  - bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat :
- Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;



UNITED NATIONS  
Office on Drugs and Crime

UNITED NATIONS CONVENTION  
AGAINST CORRUPTION



Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan konvensi PBB melawan korupsi

## *Tujuan Pemantauan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi*

Menjelaskan kepada masyarakat kondisi terkini pemberantasan korupsi, khususnya aspek penegakan hukum. Selain itu, pemantauan ini juga diharapkan sebagai bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan, baik Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun Mahkamah Agung dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi.









# HASIL PEMANTAUAN DAN ANALISIS

TREN VONIS 2021

# PART I

## *Catatan Umum*

# Fungsi Administrasi Pengadilan



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**AMANAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PADA HARI JADI MAHKAMAH AGUNG RI KE-74  
19 AGUSTUS 2019**

*"PERADILAN MODERN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNTUK MELAYANI"*

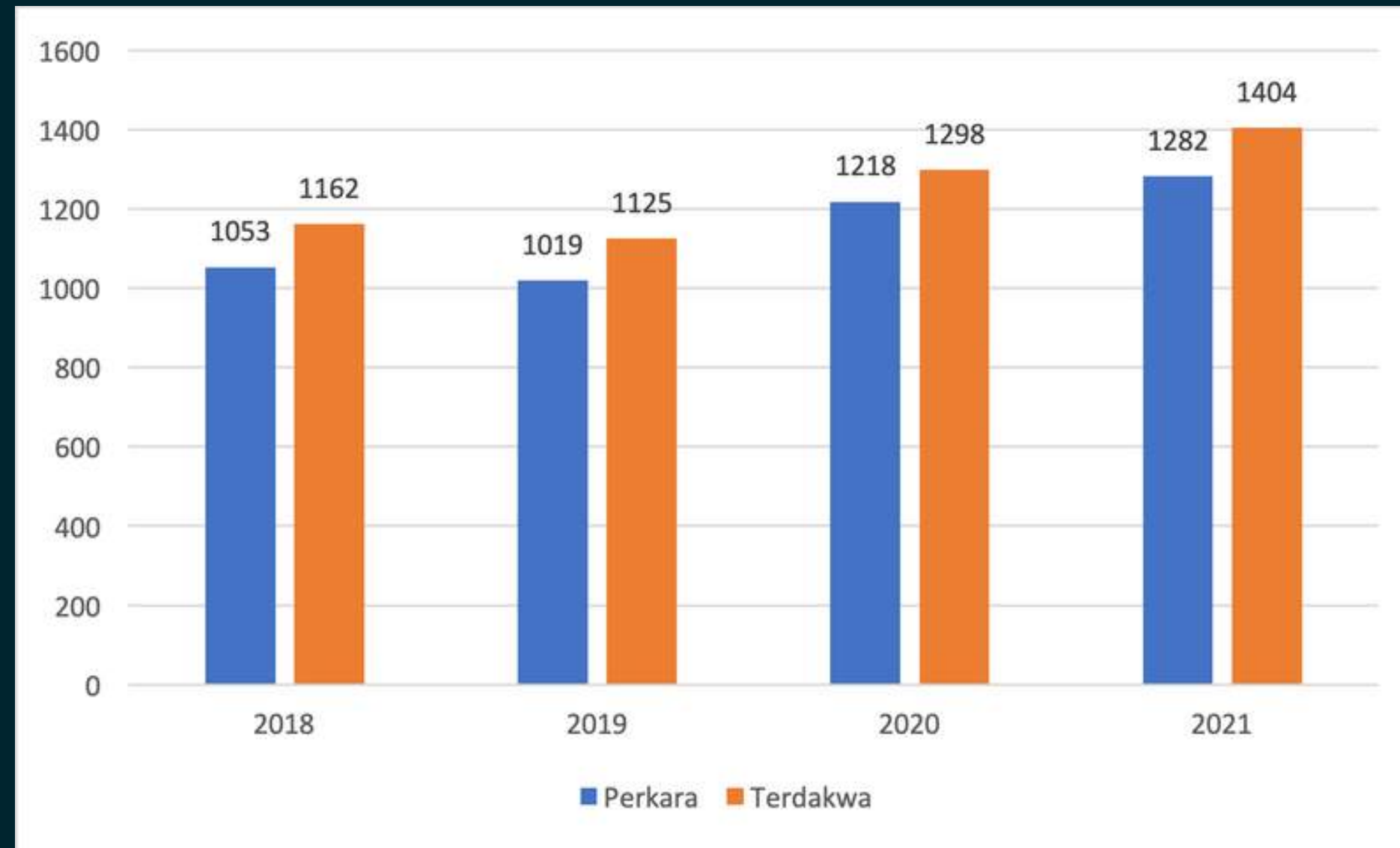
Pasal 24 ayat (2) UU No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011

*"Dari total 34 pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri yang dipantau, setidaknya 20 SIPP diantaranya tergolong tidak lengkap"*

Temuan paling jelas terlihat pada kolom "Data Umum" di dalam SIPP. Mulai dari minimnya informasi identitas terdakwa, ketiadaan standar penulisan dakwaan, dan kekosongan informasi perihal penasihat terdakwa. Selain itu, bagian penuntutan dan putusan juga masih banyak ditemukan permasalahan penulisan.

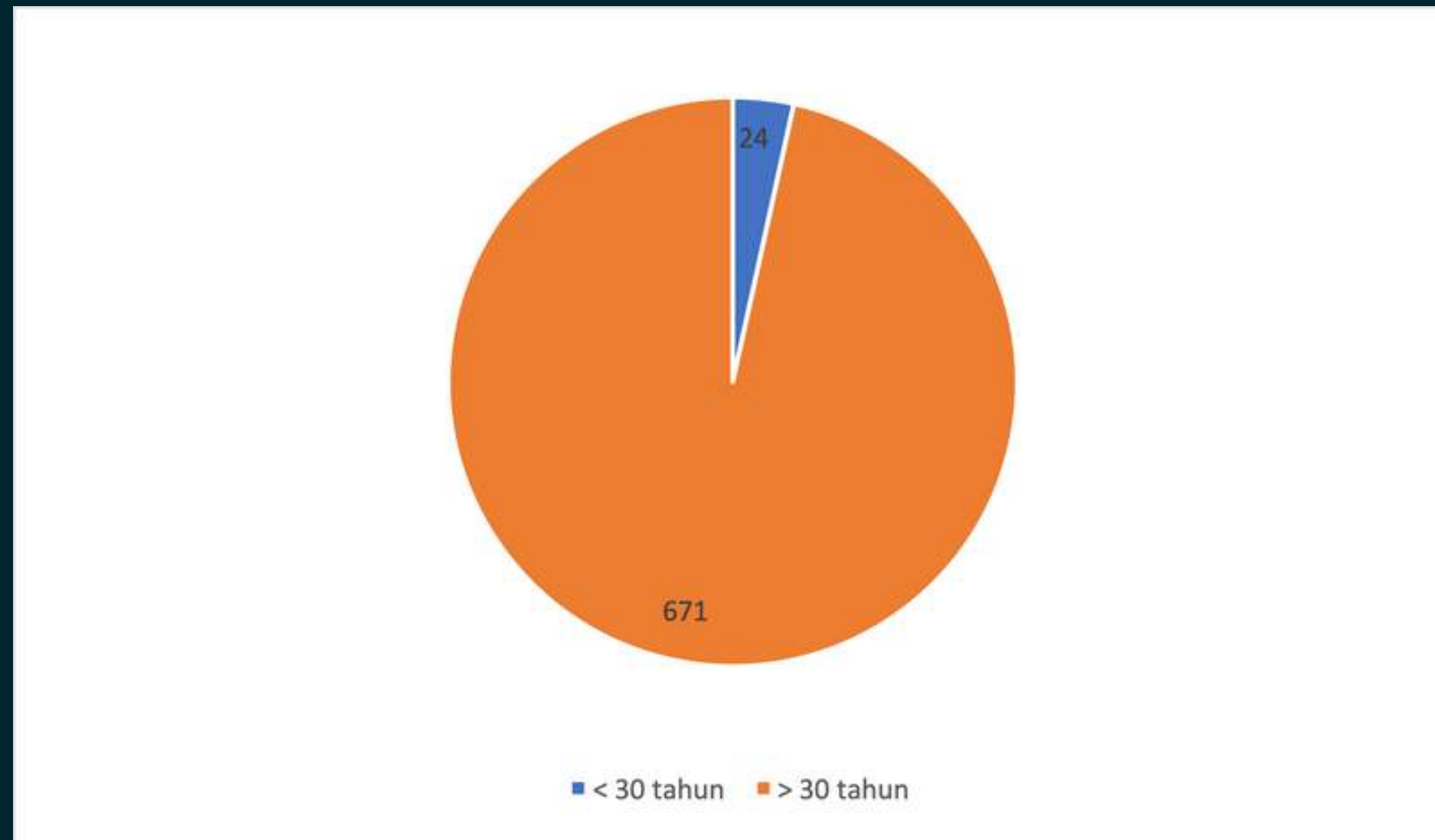


Jumlah Terdakwa dan Perkara



Perkara yang disidangkan pada periode ini melonjak cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada sisi lain, kenaikan ini juga menandakan bahwa lembaga kekuasaan kehakiman berhasil beradaptasi dengan kondisi "new normal" yang lalu dengan mengusung konsep persidangan daring.

Usia Terdakwa



UU 40/2009 menyebutkan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun.

*Pelaku termuda berusia 24 tahun dalam perkara korupsi yang memakan kerugian keuangan negara Rp 2,1 miliar dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. Sedangkan usia paling tua - 79 tahun - di Sumut dari klaster anggota DPRD. Ia terbukti melakukan praktik suap-menyuap sebesar Rp 477 juta.*

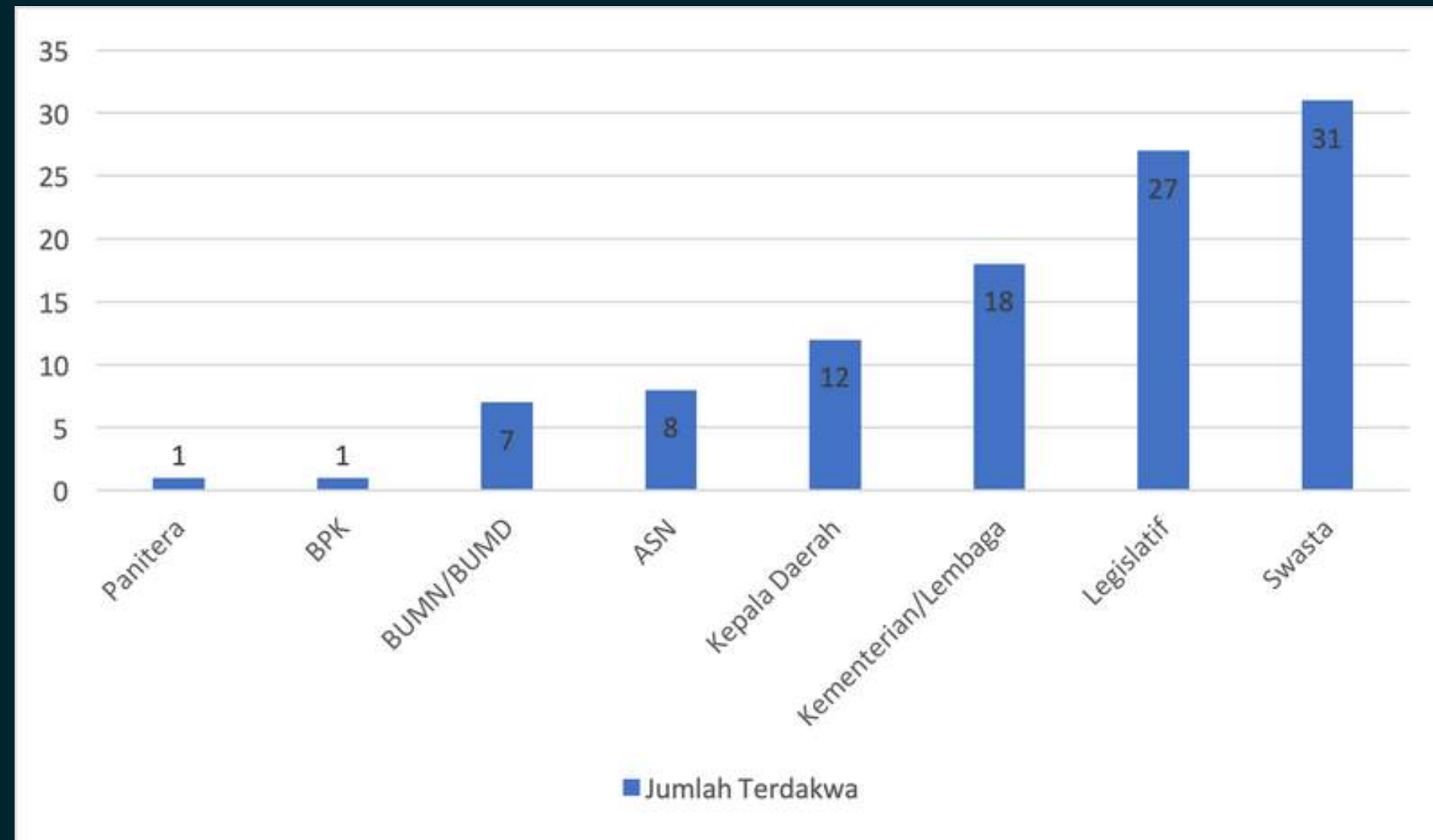
Pekerjaan Terdakwa



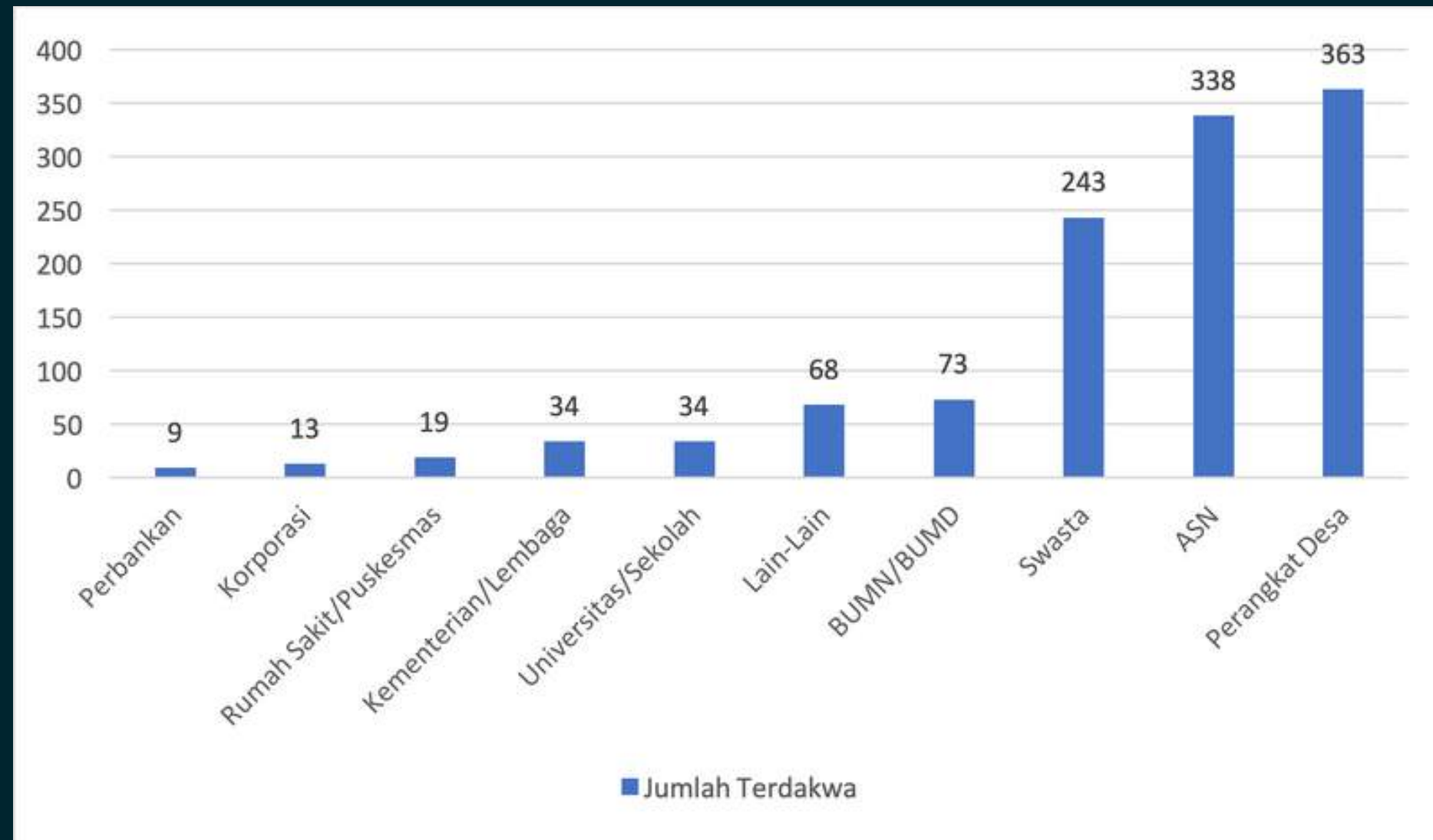
No	Pekerjaan	Jumlah
1	Perangkat Desa	363
2	Pemerintah Daerah	346
3	Swasta	275
4	BUMN/BUMD	80
5	Lain-Lain	69
6	Kementerian/Lembaga	52
7	Perbankan	39
8	Legislatif	35
9	Pendidikan	34
10	Rumah Sakit	19
11	Kepala Daerah	17
12	Korporasi	13
13	Penegak Hukum	8
14	Pemilu	5
15	Advokat	4
16	Panitera	1

Tahun	Perangkat Desa	ASN	Swasta	Legislatif	Kepala Daerah
2016	-	217	150	39	32
2017	-	456	224	33	94
2018	158	319	242	53	28
2019	188	263	138	43	3
2020	330	321	286	33	10
2021	363	346	275	35	17
Total	1.039	1.922	1.315	236	184

*Fenomena korupsi politik masih terjadi, bahkan meningkat pada tahun 2021. Bersamaan dengan itu, klaster Perangkat Desa, ASN, dan Swasta selalu menjadi langganan peringkat atas berdasarkan latar belakang pekerjaan terdakwa sejak tahun 2018 lalu.*



Mengendurnya penindakan KPK semakin terlihat. Terdakwa dengan latar belakang politik, seperti anggota legislatif, lebih sedikit dituntut oleh KPK. Tahun 2018 dan 2019, KPK berhasil menuntut 96 anggota legislatif, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Namun, dua tahun terakhir mereka hanya mampu menuntut 89 orang dari klaster legislatif. Untuk tahun ini, KPK memproses hukum 27 orang yang didominasi anggota legislatif daerah, praktis hanya 1 orang berasal dari anggota DPR RI. Ini kian menguatkan sinyal bahwa KPK tidak masuk lebih dalam membongkar korupsi sektor politik.



*Kejaksaan mayoritas mengusut keterlibatan perangkat desa dan ASN. Dari sini, terlihat Kejaksaan belum banyak menangani perkara korupsi di wilayah politik. Padahal, kewenangannya sama seperti KPK yang mendasari tindakannya melalui UU Tipikor. Namun, Kejaksaan jauh mengungguli KPK dalam menangani korupsi yang memiliki kaitan dengan korporasi.*

TREN VONIS 2021

## **PART II**

***Jenis Tindak Pidana Korupsi berdasarkan  
Pasal dalam Surat Dakwaan***



*Korupsi dengan irisan kerugian keuangan negara dan suap selalu menempati posisi puncak setiap tahunnya. Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, maka pembentuk regulasi harus segera merevisi UU Tipikor dengan memberikan pemberatan dalam Pasal 3 dan Pasal 5.*





*Rohadi hanya satu diantara 12 orang yang didakwa pencucian uang sepanjang tahun 2021. Ini menandakan, baik Kejaksaan maupun KPK, belum memiliki perspektif pemberian efek jera melalui instrumen pencucian uang. Selain itu, penuntut umum yang dominan menggunakan UU TPPU adalah Kejaksaan. Kritik tajam tepat ditujukan kepada KPK sebagai lembaga yang digadang menjadi trigger mechanism pemberantasan korupsi.*

TREN VONIS 2021

## **PART III**

***Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Jumlah  
Kerugian dan Penerimaan Lainnya***

Sepanjang tahun 2021 kerugian negara yang timbul mencapai Rp 62,9 triliun



*Dalam lima tahun terakhir, kerugian negara tahun 2021 menjadi yang terbesar. Ini semakin memperjelas bahwa praktik korupsi sudah begitu mengkhawatirkan. Kerugian negara yang besar itu disebabkan perkara korupsi kondensat dan jiwasraya. Sebab, perkara tersebut menelan kerugian negara puluhan triliun rupiah.*

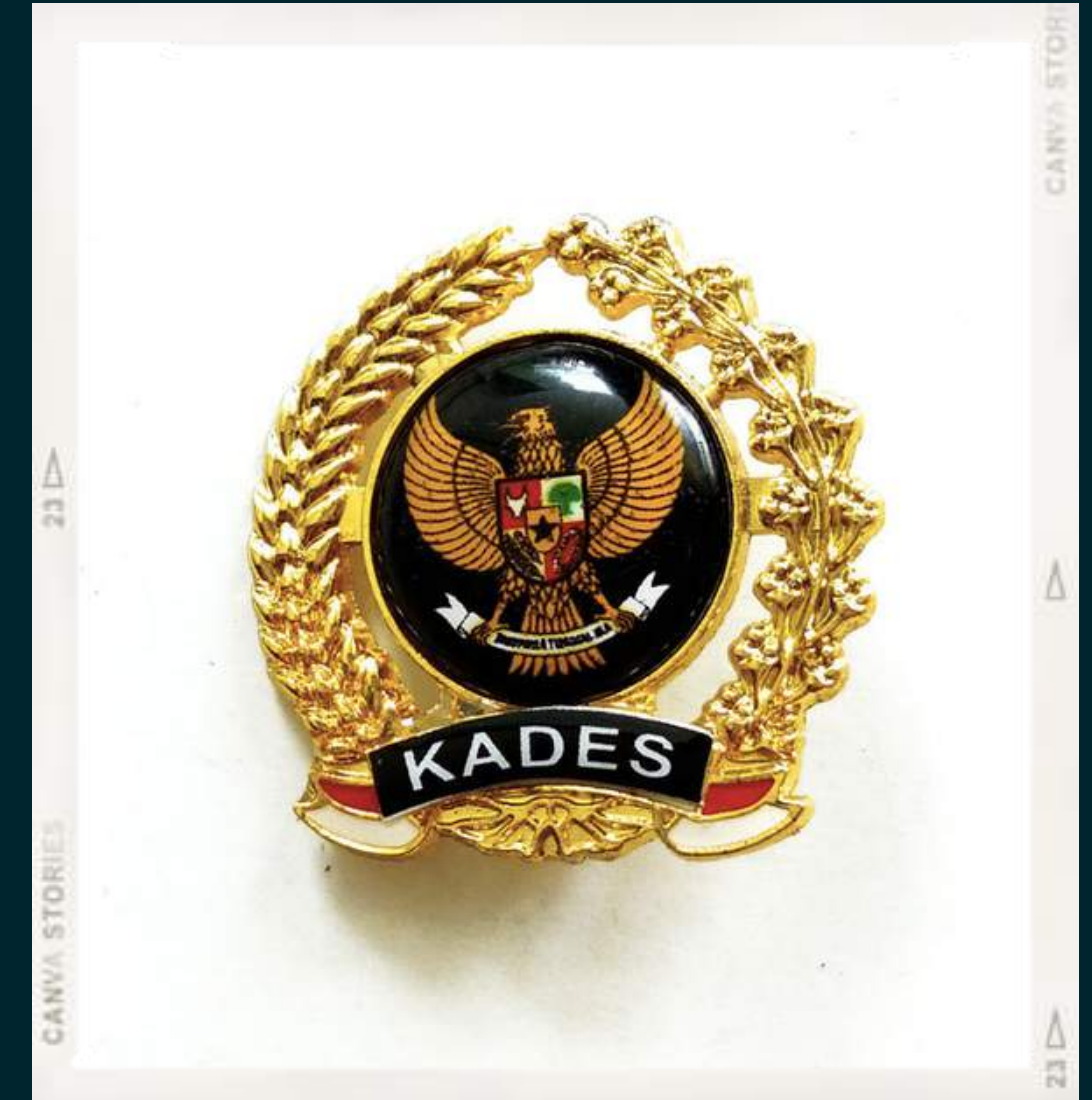
No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Perkara	Kerugian Negara	Penuntut Umum
1	7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Raden Priyono	Kepala BP Migas	Penjualan Kondensat oleh PT TPPI	Rp 36 triliun	Kejaksaan
2	5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst	Fakhri Hilmi	Kepala Departemen Pengawasan OJK	Korupsi Jiwasraya	Rp 16,8 triliun	Kejaksaan
3	55/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Drs Irianto	Komisaris PT Flemings Indo Batam	Korupsi Impor Tekstil	Rp 1,6 triliun	Kejaksaan
4	17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg	Caitano Soares	Kasie Hub Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Manggarai Barat	Korupsi Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	Rp 1,3 triliun	Kejaksaan
5	1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst	Maria Pauliene Lumowa	Swasta	Pembobolan kas BNI Cab Kebayoran Baru	Rp 1,2 triliun	Kejaksaan



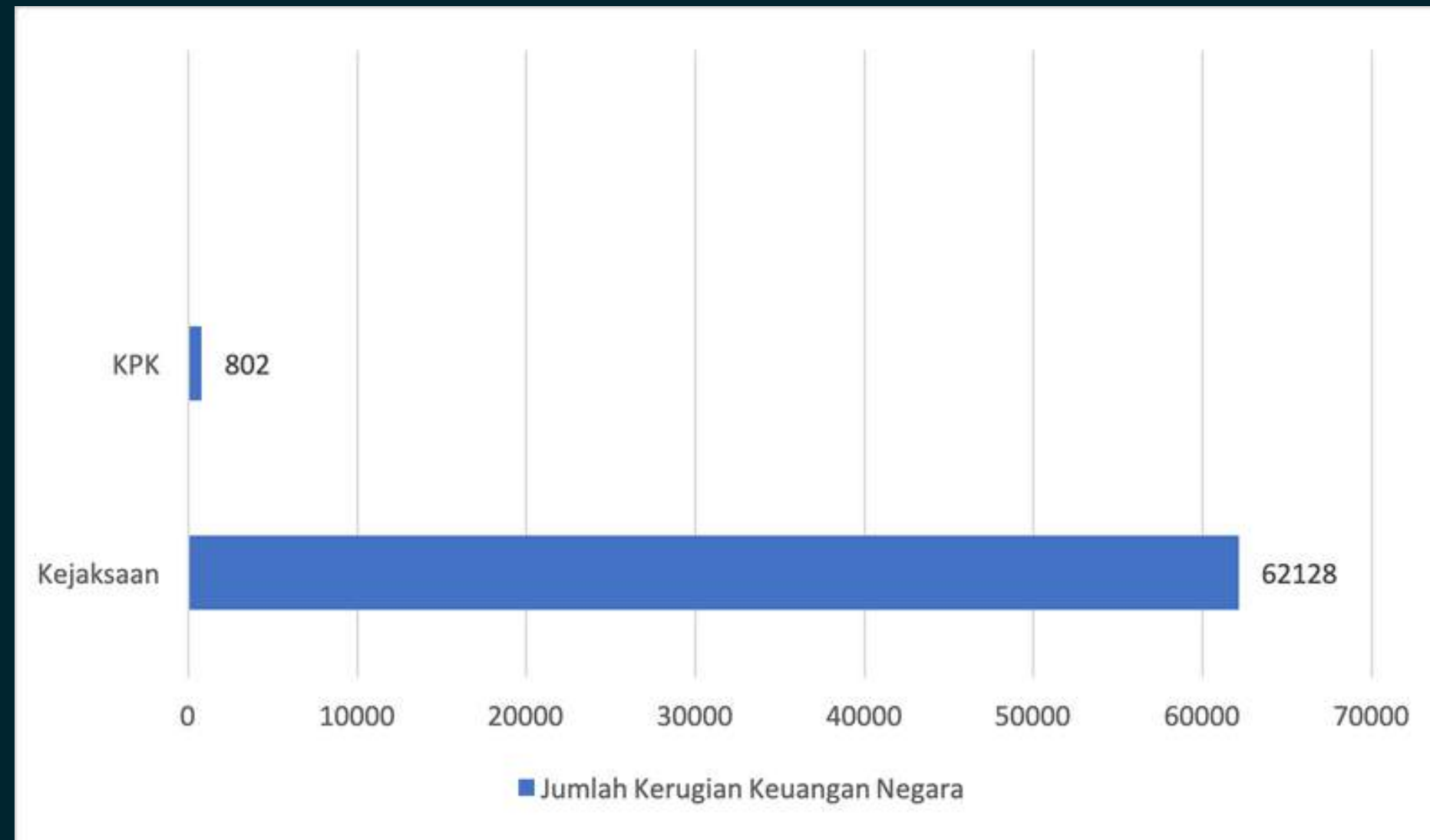
Politisi  
Kerugian Negara Rp 1,3 triliun



BUMN/BUMD  
Kerugian Negara Rp 262 miliar



Perangkat Desa  
Kerugian Negara Rp 140 miliar



*KPK praktis hanya menangani 1% dari total kerugian keuangan negara yang timbul sepanjang tahun 2021. Ini semakin memperlihatkan ketiadaan perspektif asset recovery dari KPK.*



Untuk tindak pidana suap dan gratifikasi, jumlah penerimaan para pelaku mencapai Rp 369,4 miliar



Edhy Prabowo  
(Menteri KKP)  
Rp 25,6 miliar



Taufiqqurahman  
(Bupati Nganjuk)  
Rp 25,6 miliar



Ismunandar  
(Bupati Kutai Timur)  
Rp 27,4 miliar



Juliari P Batubara  
(Menteri Sosial)  
Rp 32,4 miliar



Nurhadi  
(Sekretaris MA)  
Rp 49,4 miliar



Hadinoto Soedigno  
(Dir Teknik PT Garuda Indo)  
Rp 70 miliar

Pasal 12 huruf e UU Tipikor (Pemerasan/Pungli) = Rp 4,2 miliar



ASN  
29 orang



Aparat Penegak Hukum  
3 orang



BUMN/BUMD  
3 orang



Perangkat Desa  
3 orang



Swasta  
1 orang



Kementerian/Lembaga  
1 orang

Tindak pidana korupsi dengan jenis penggelapan dalam jabatan menimbulkan kerugian sebesar Rp 7,6 miliar

TREN VONIS 2021

# PART IV

## *Pidana Tambahan Uang Pengganti*

Alih-alih pemulihan kerugian tercapai, uang pengganti sepanjang tahun 2021 saja hanya Rp 1,4 triliun



*Pemulihan kerugian sangat terpuruk tahun 2021. Ini semakin memperlihatkan ketiadaan perspektif pemberian efek jera dari aspek ekonomi, baik dari penuntut umum maupun majelis hakim.*



## Hakim Tolak Tuntutan Jaksa Wajibkan Nurhadi Bayar Uang Pengganti Rp 83 M

Zunita Putri - detikNews

Rabu, 10 Mar 2021 21:26 WIB



Ilustrasi palu hakim. (Ari Saputra/detikcom)

"Oleh karena di persidangan terungkap oleh uang yang diterima terdakwa adalah uang pribadi dari pemberi suap dan pemberi gratifikasi, **dan bukan uang negara**, sehingga majelis berkesimpulan bahwa dalam perkara ini tidak ada kerugian negara, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendirian kepada para terdakwa **tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti**"

Pasal 17 UU Tipikor dan Pasal 3 PerMA 5/2014

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Tuntutan UP	Vonis UP	Penuntut Umum	PN
1	21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg	Massimiliano De Reviziis	Rp 7 miliar	-	Kejaksaan	Kupang
2	33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks	Gunawan Subyantoro	Rp 7,1 miliar	-	Kejaksaan	Makassar
3	2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp	Agustino	Rp 8,4 miliar	-	Kejaksaan	P Pinang
4	6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb	Izzac Balthazar	Rp 9 miliar	-	Kejaksaan	Ambon
5	2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks	M. Riandi	Rp 9,6 miliar	-	Kejaksaan	Makassar
6	17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst	Yunan Anwar	Rp 16,7 miliar	-	Kejaksaan	Jakarta
7	20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb	Ali Arifin	Rp 17,3 miliar	-	Kejaksaan	Jambi
8	42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	Memet Soilangon S	Rp 32,5 miliar	-	Kejaksaan	Medan
9	45/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Nurhadi	Rp 83 miliar	-	KPK	Jakarta
10	5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb	Idris Rolobessy	Rp 229,4 miliar	-	Kejaksaan	Ambon

Formula pemberian efek jera tidak cukup hanya dengan mengandalkan pemenjaraan, namun mesti paralel dengan pengembalian kerugian keuangan negara



## LAPORAN PENELITIAN

# Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

2022

Jika konsep ini diterima, maka penegak hukum diperbolehkan menyita aset, sekali pun tidak terkait langsung dengan tindak pidananya. Hal ini penting sebagai jaminan bahwa terdakwa mampu melunasi pembayaran uang pengganti.

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Vonis Uang Pengganti	PN
1	49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg	Lissa Rukmi Utari	Komisaris Utama PT Amestis Indogeo Perakarsa	Rp 45,7 miliar	Bandung
2	25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr	Iwan Ratman	Direktur PT Mahakam Gerbang Raja Migas	Rp 49,4 miliar	Samarinda
3	38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst	Jasmina J Fatima	Direktur Utama PT Jazmina Asri Kreasi	Rp 57,3 miliar	Jakarta
4	60/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Rennier Abdul Rahman	Komisaris PT Aditya Tirta Renata	Rp 115,2 miliar	Jakarta
5	1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst	Maria Pauliene Lumowa	PT Gramaindo Mega Indonesia	Rp 185,8 miliar	Jakarta

Penjantuhan pidana tambahan uang pengganti yang tinggi oleh majelis hakim harus diikuti dengan proses eksekusi yang cepat dan transparan oleh jaksa eksekutor

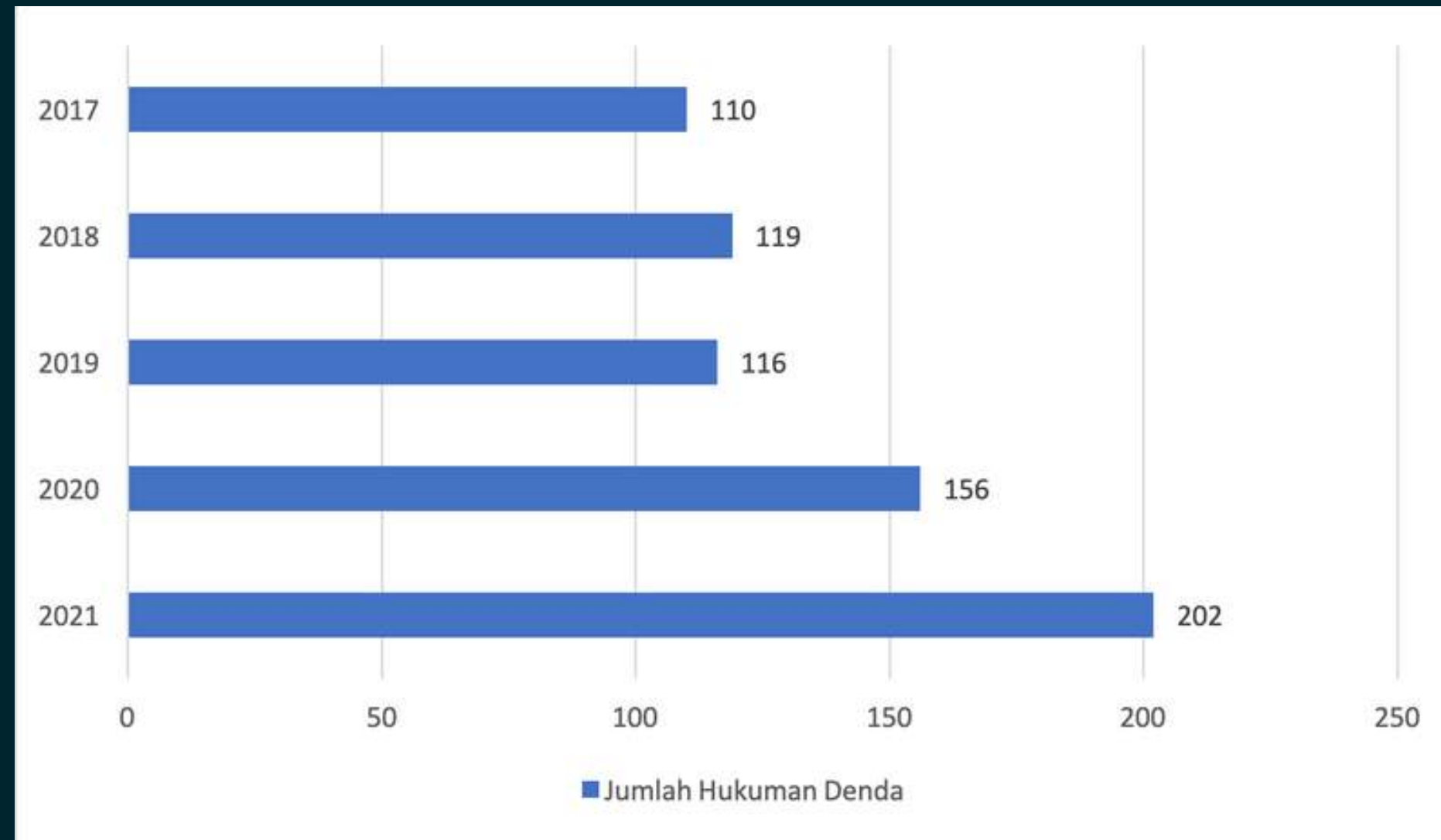
TREN VONIS 2021

# PART V

*Denda*

Sepanjang tahun 2021, total denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sebesar Rp 202,3 miliar.  
Jika dirata-ratakan, setiap terdakwa dijatuhi denda sebesar Rp 162,4 juta.





Denda maksimal hanya dijatuhkan kepada 14 orang terdakwa. Padahal, sepanjang tahun 2021, ada sejumlah terdakwa yang layak dikenakan hukuman tersebut, misalnya, Edhy Prabowo, Juliari P Batubara, Pinangki Sirna Malasari, atau pelaku-pelaku korupsi politik lainnya.



Pengaturan sanksi denda tidak pernah berubah sejak tahun 2001 lalu. Sanksi maksimal hanya Rp 1 miliar. Ditambah lagi hal itu hanya diatur dalam tiga jenis korupsi, yakni, kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3), penyuapan (Pasal 12), dan gratifikasi (Pasal 12B)

## Disparitas Penjatuhan Denda

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Pasal Putusan	Jumlah Denda
1	57/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Budi Pirmansyah	Kepala Desa Bojongsari	Rp 300 juta	Pasal 2 ayat (1)	Rp 300 juta
2	15/PID.SUS-TPK/2021/PN MND	Vonnie A Panambunan	Bupati Minahasa Utara	Rp 8,8 miliar	Pasal 2 ayat (1)	Rp 200 juta
3	8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby	Fariantono	Kepala Desa Prambangan	Rp 871 juta	Pasal 2 ayat (1)	Rp 300 juta
4	5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg	Indra Santo	Direktur PDAM Tirta Karimun	Rp 4,9 miliar	Pasal 2 ayat (1)	Rp 200 juta

TREN VONIS 2021

# PART VI

## *Pemetaan Tuntutan*

*"Surat tuntutan menjadi satu elemen penting dalam proses penanganan perkara"*

Sekalipun hal itu tidak langsung berdampak langsung kepada terdakwa, namun dari sana masyarakat dapat melihat sejauh mana perspektif penuntut umum dalam memandang suatu kejahatan. Terlebih, mereka selama ini dianggap sebagai representasi negara, sekaligus korban, yang mestinya bisa berorientasi pada penjeraan terhadap pelaku dan pemulihan atas dampak kejahatan.

01

## Penggunaan Pasal Tuntutan

Pemetaan ini akan melihat penggunaan pasal UU Tipikor dan UU TPPU sebagai instrumen penuntutan

02

## Rata-Rata Tuntutan

Bagian ini akan melihat rata-rata penuntutan penjara sepanjang persidangan tahun 2021

03

## Berat Ringan Tuntutan

Isu ini akan mengulas kuantitas terdakwa yang dituntut ringan, sedang, dan berat

04

## Denda dan Uang Pengganti

Jumlah tuntutan denda dan uang pengganti yang dituntut oleh penuntut umum akan diulas

05

## Disparitas Tuntutan

Disparitas tuntutan yang menjadi permasalahan klasik masih terjadi dan akan dipaparkan

06

## Pencabutan Hak Politik

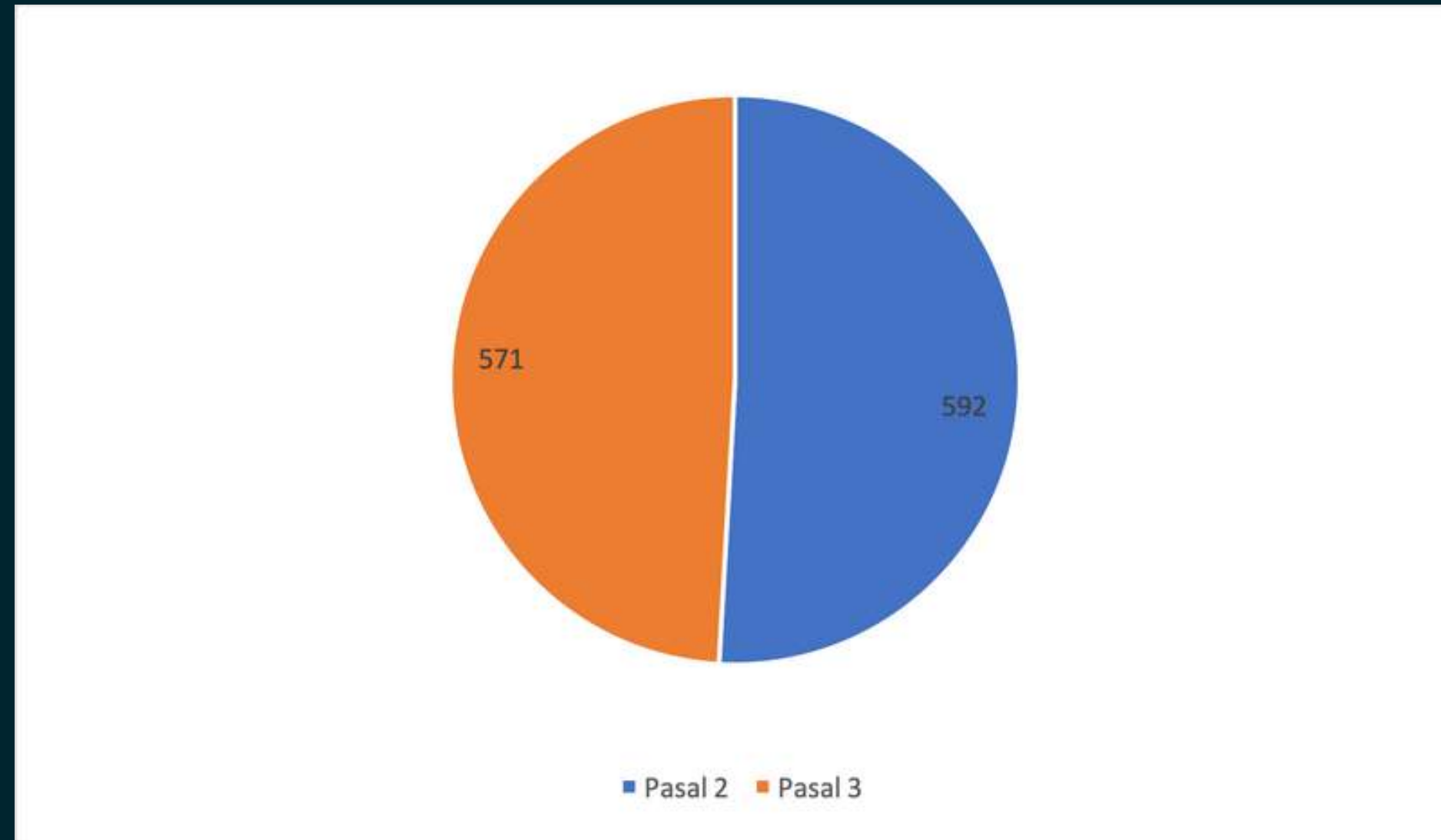
Hukuman tambahan berupa tuntutan pencabutan hak politik sepanjang tahun 2021 akan dibahas

07

## Tuntutan Bermasalah

Sepanjang tahun 2021 banyak ditemukan tuntutan-tuntutan ganjil oleh penuntut umum

# *Penggunaan Pasal Tuntutan*



satu sisi memang terjadi perbaikan karena penuntut umum dominan menggunakan Pasal 2 ketimbang Pasal 3. Hal seperti ini belum terlihat pada tahun-tahun sebelumnya. Pola penggunaan Pasal 2 yang dominan ini harus dipertahankan pada periode mendatang untuk menunjukkan perspektif pemberian efek jera terhadap pelaku dan menegaskan sikap penuntut umum selaku representasi kepentingan korban.



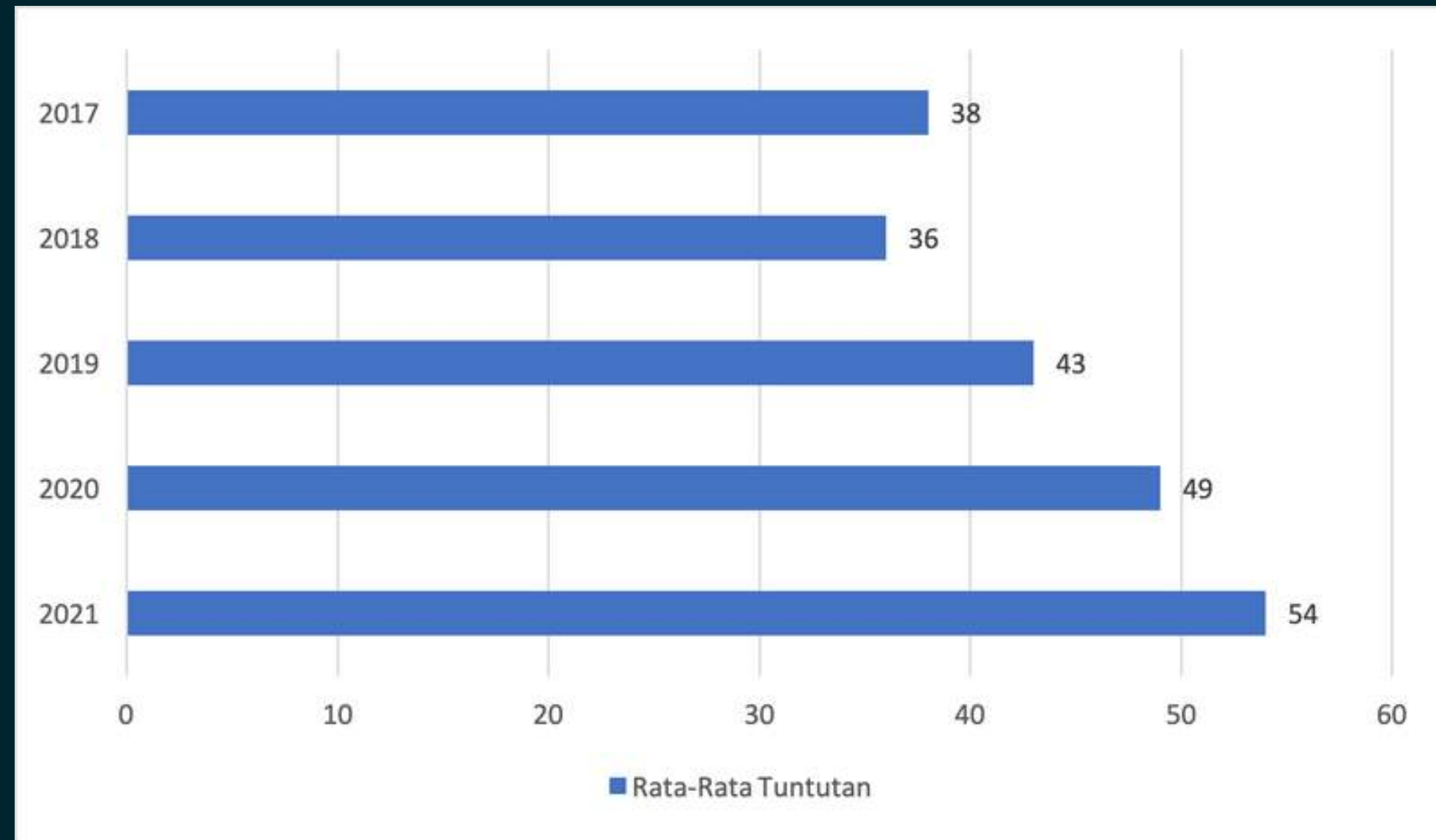
*"Dari seluruh jumlah tedakwa yang mencapai 1.404 orang, hanya 11 orang saja dituntut dengan UU Anti Pencucian Uang"*

Pelaku korupsi akan selalu berupaya untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan dengan berbagai cara.

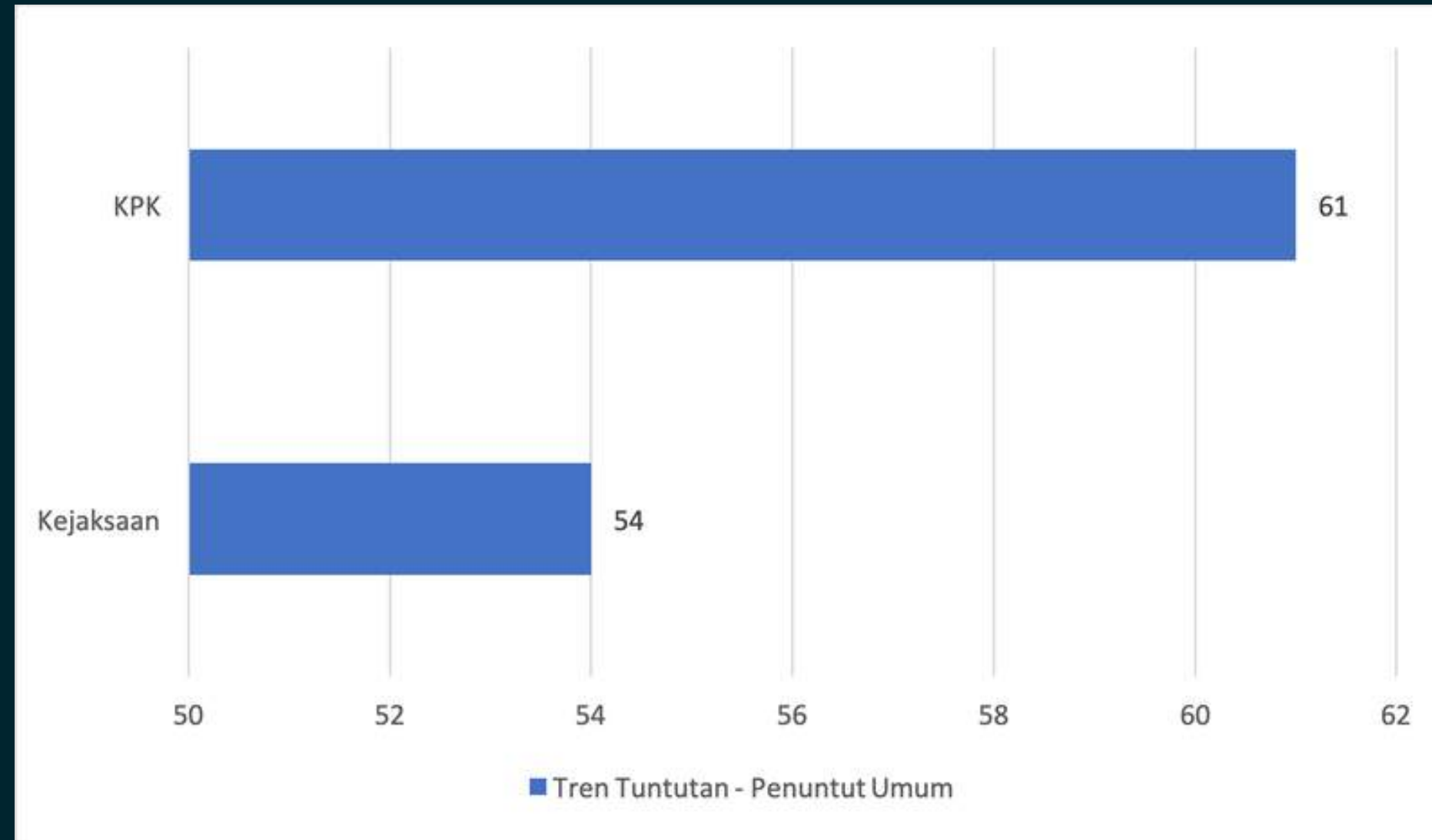
Maka dari itu, jerat pencucian uang harus lebih ditingkatkan pada masa mendatang. Keuntungan menggunakan pencucian uang, diantaranya, menggunakan pendekatan *follow the money*, mengatur mekanisme pembalikan beban pembuktian, dan minim resistensi pelaku

*Rata-Rata Tuntutan*

Rata-rata tuntutan penuntut umum selama tahun 2021 hanya 4,5 tahun penjara



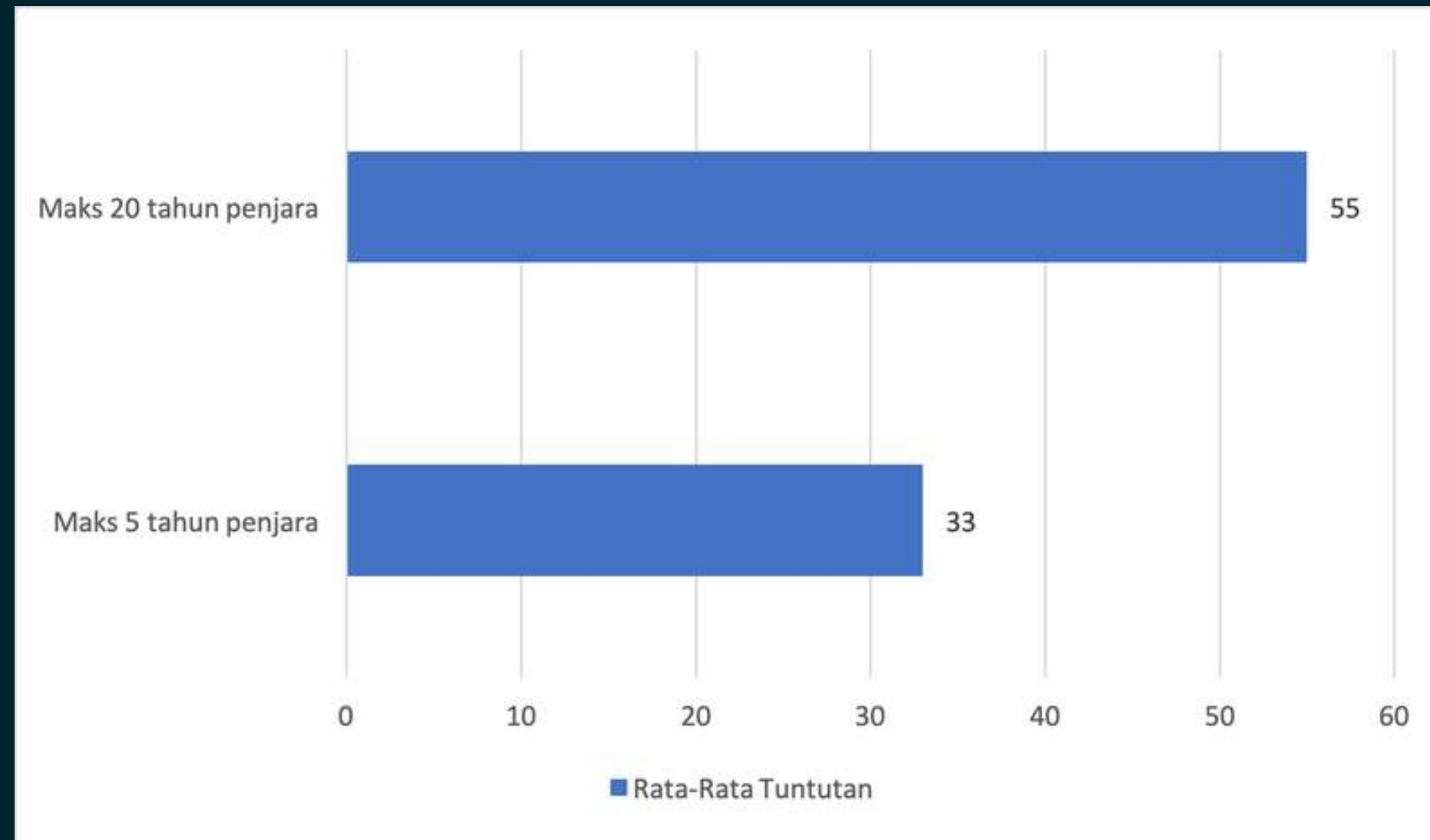
*Jika pembuktian telah mengakomodir surat dakwaan, disertai dengan dampak kejahatannya signifikan, dan latar belakang terdakwa berasal dari kalangan pejabat publik, mestinya penuntut umum tidak ragu untuk menuntut dengan hukuman maksimal.*



Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, memang dua lembaga penuntut itu mengalami perbaikan. Hanya saja, hal itu secara signifikan terlihat pada kejaksaan. Sebab, Korps Adhyaksa tersebut mengalami kenaikan, dari yang sebelumnya hanya 4 tahun, sekarang menjadi 4 tahun 6 bulan. Sedangkan KPK cuma naik tiga bulan dari tahun 2020 lalu.

*Pasal 52 KUHP: Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya , atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.*

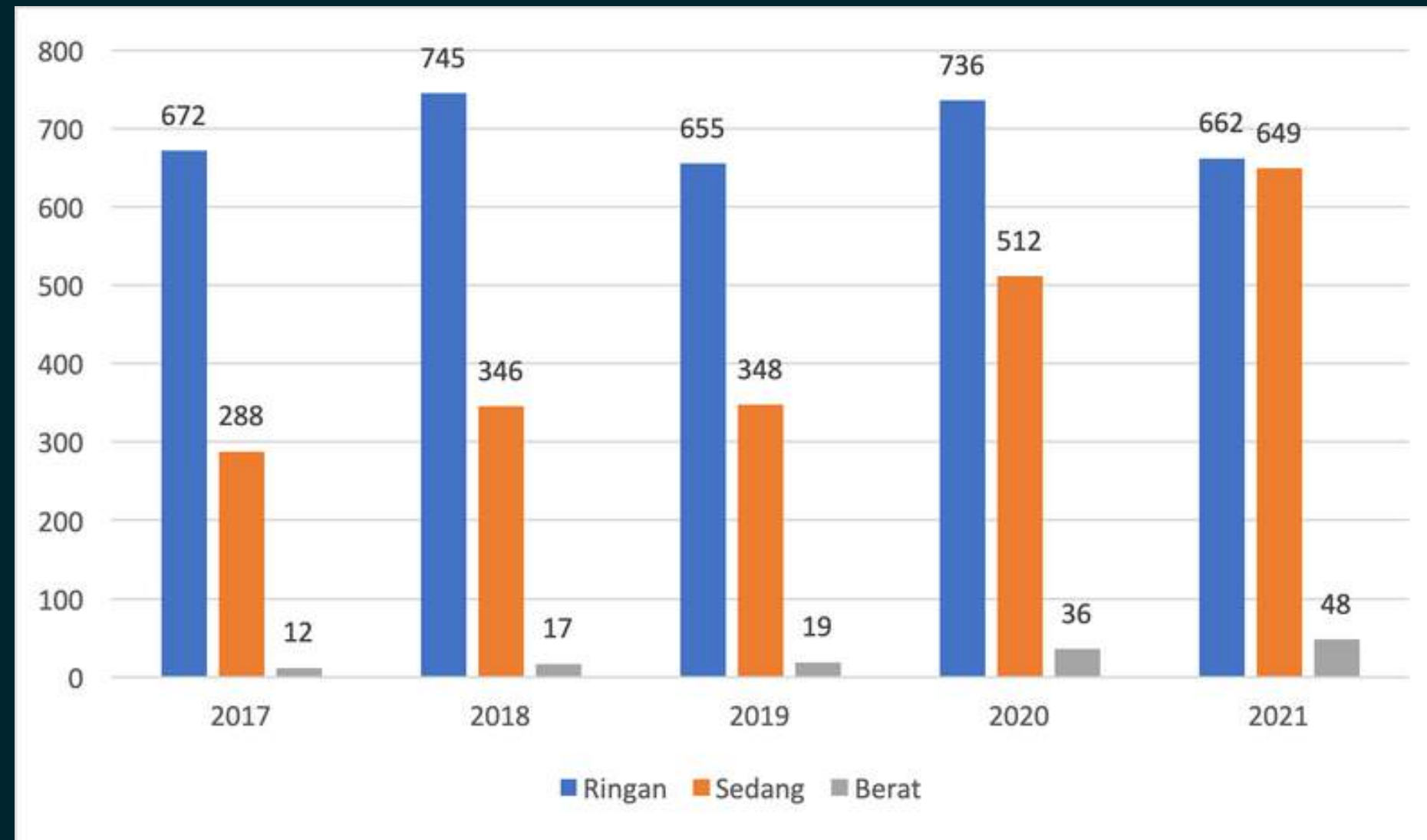
Dari total 346 ASN yang dituntut, rata-rata hukuman penjaranya hanya 4 tahun 1 bulan penjara. Ini menandakan, aparat penegak hukum belum sepenuhnya menerapkan pemberatan pidana berdasarkan latar belakang pekerjaan terdakwa.



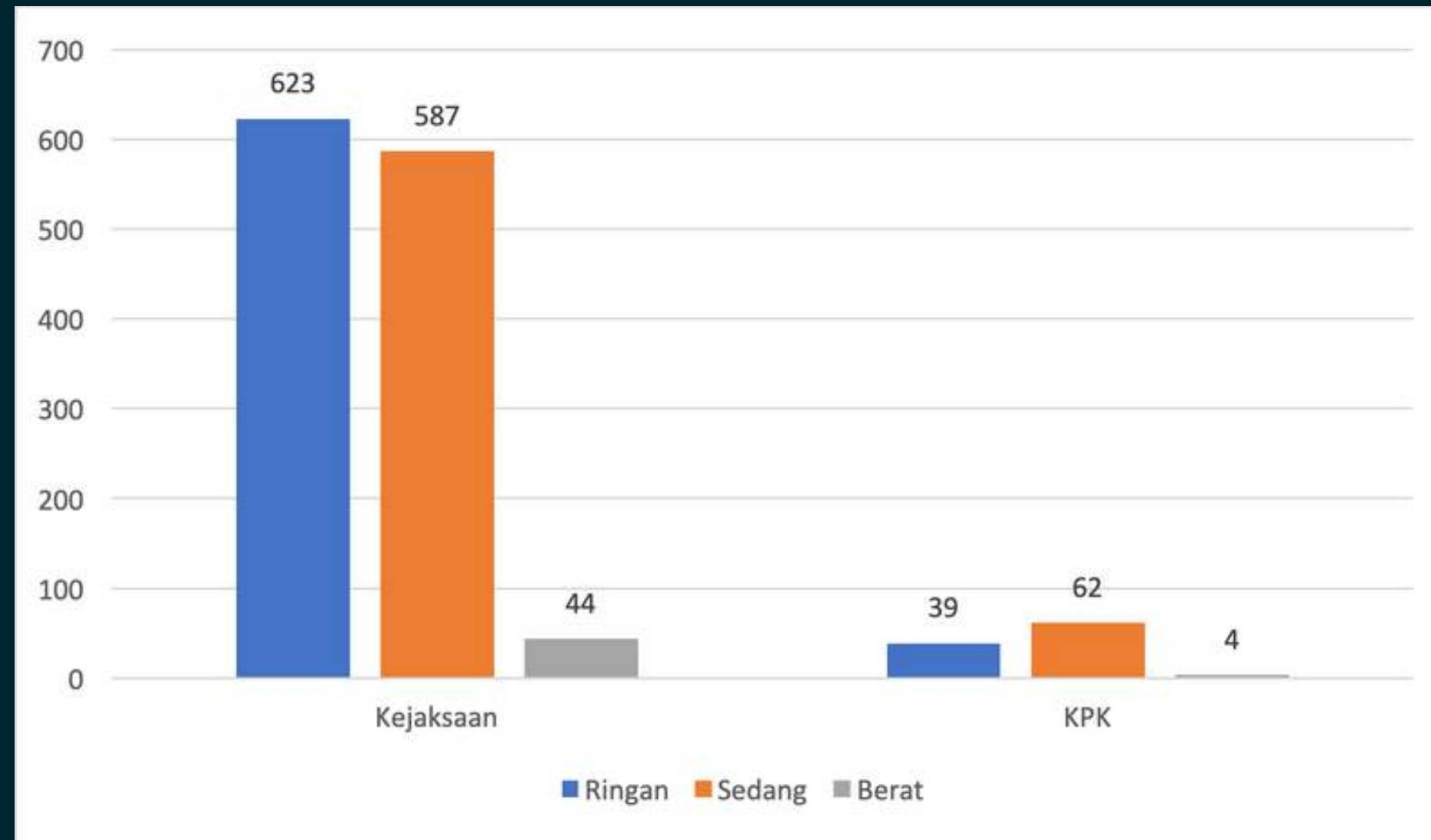
Penuntut umum masih sering menuntut ringan pelaku korupsi. Sebab, dengan menggunakan pasal yang sebenarnya memungkinkan untuk menuntut 20 tahun, atau bahkan seumur hidup penjara, ternyata rata-ratanya hanya 4 tahun 7 bulan penjara. Begitu pula untuk delik tindak pidana suap yang dapat diganjar hukuman 5 tahun penjara, akan tetapi hanya dituntut 2 tahun 9 bulan.

*Berat Ringan Tuntutan*

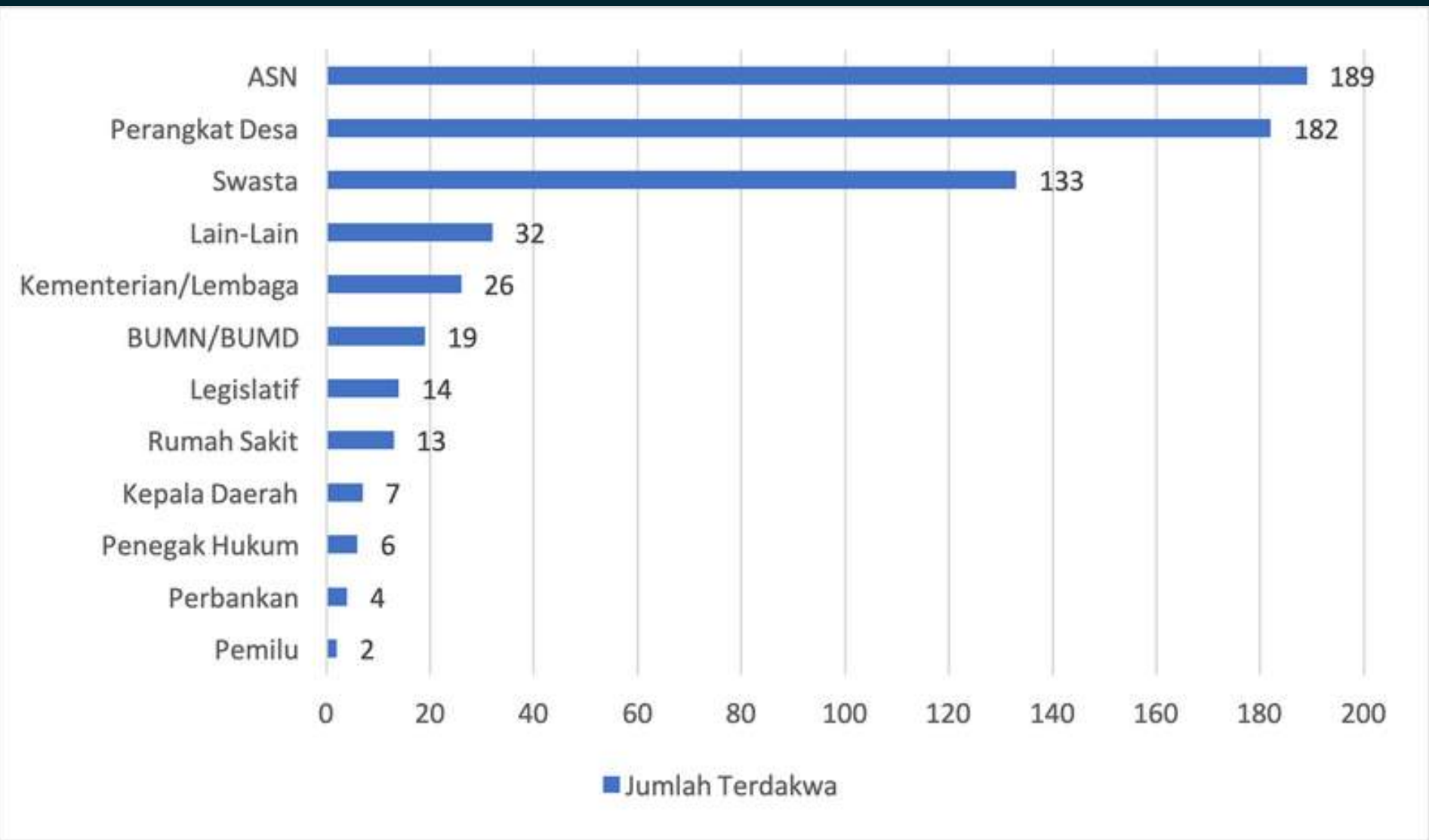




Jika dibandingkan dengan empat tahun terakhir, kinerja penuntut umum lebih baik. Setidaknya ada peningkatan untuk tuntutan dengan kategori sedang dan berat pada satu tahun terakhir. Maka dari itu, pada tahun mendatang tuntutan ringan harus diminimalisir agar pihak yang dirugikan, seperti negara maupun masyarakat, merasa diwakili oleh penuntut umum.



Kejaksaan sendiri, masih didominasi dengan tuntutan ringan, sedangkan KPK stagnan pada wilayah tuntutan sedang sebagaimana tahun sebelumnya. Maka dari itu, data ini dapat membantah segala pernyataan kejaksaan maupun KPK yang selalu mengklaim telah mendukung upaya pemberantasan korupsi.

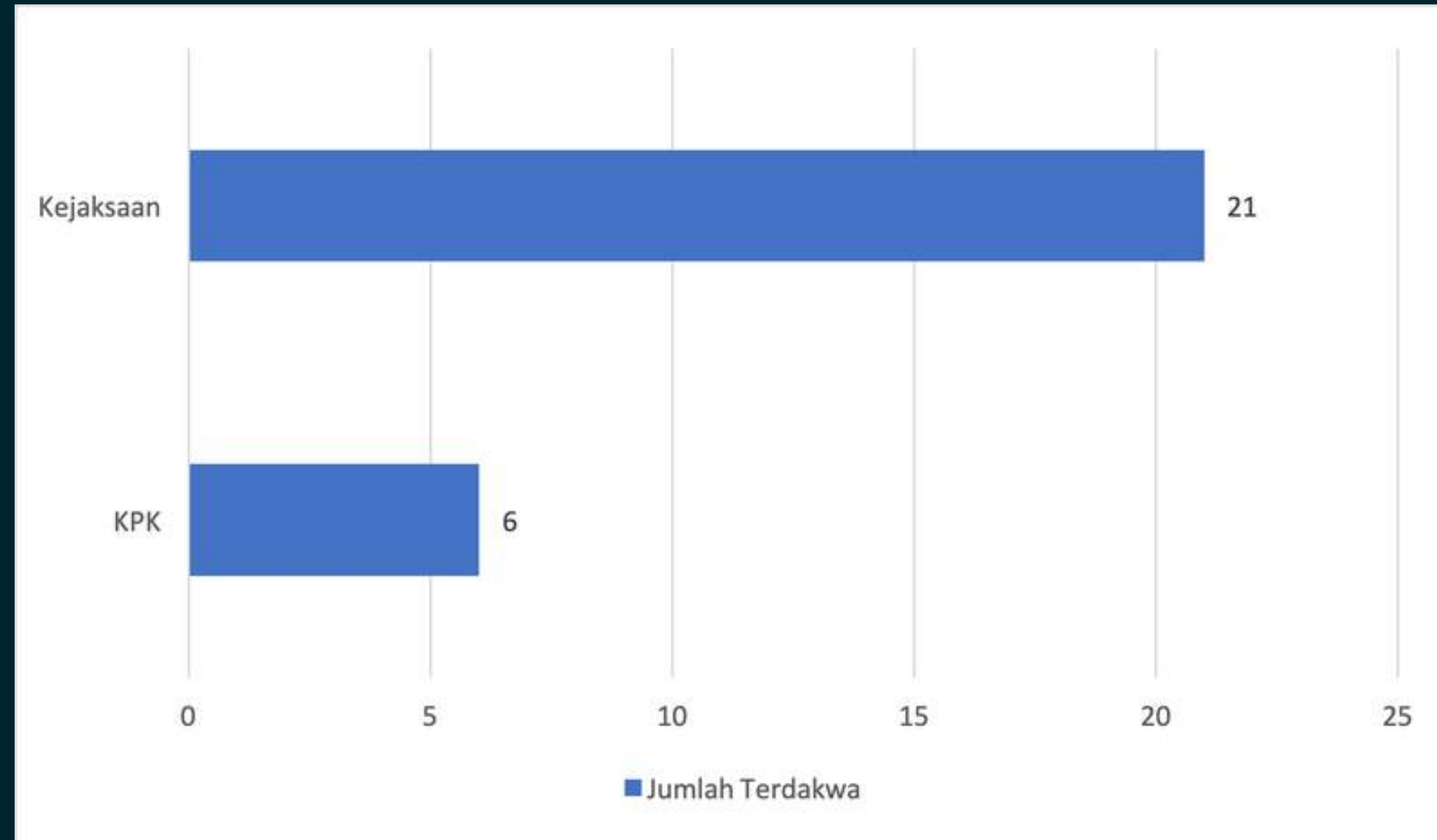


- Dari total 346 ASN yang menjadi terdakwa korupsi, setengah diantaranya dituntut ringan.
- Hampir lima puluh persen dari seluruh aktor politik (kepala daerah dan anggota legislatif) yang disidangkan juga hanya dituntut di bawah 4 tahun penjara.
- Klaster penegak hukum sendiri, praktis hampir seluruhnya dituntut ringan. Bisa dibayangkan, total penegak hukum yang disidangkan selama tahun 2021 sebanyak 8 orang, namun 6 orang diantaranya malah diganjar dengan hukuman ringan oleh penuntut umum.

*Tuntutan Denda dan Uang Pengganti*

Total tuntutan denda sebesar Rp 281,8 miliar.  
Jika dirata-ratakan, setiap terdakwa dituntut untuk membayar Rp 207 juta.

# Pemetaan Tuntutan Denda Maksimal Penuntut Umum



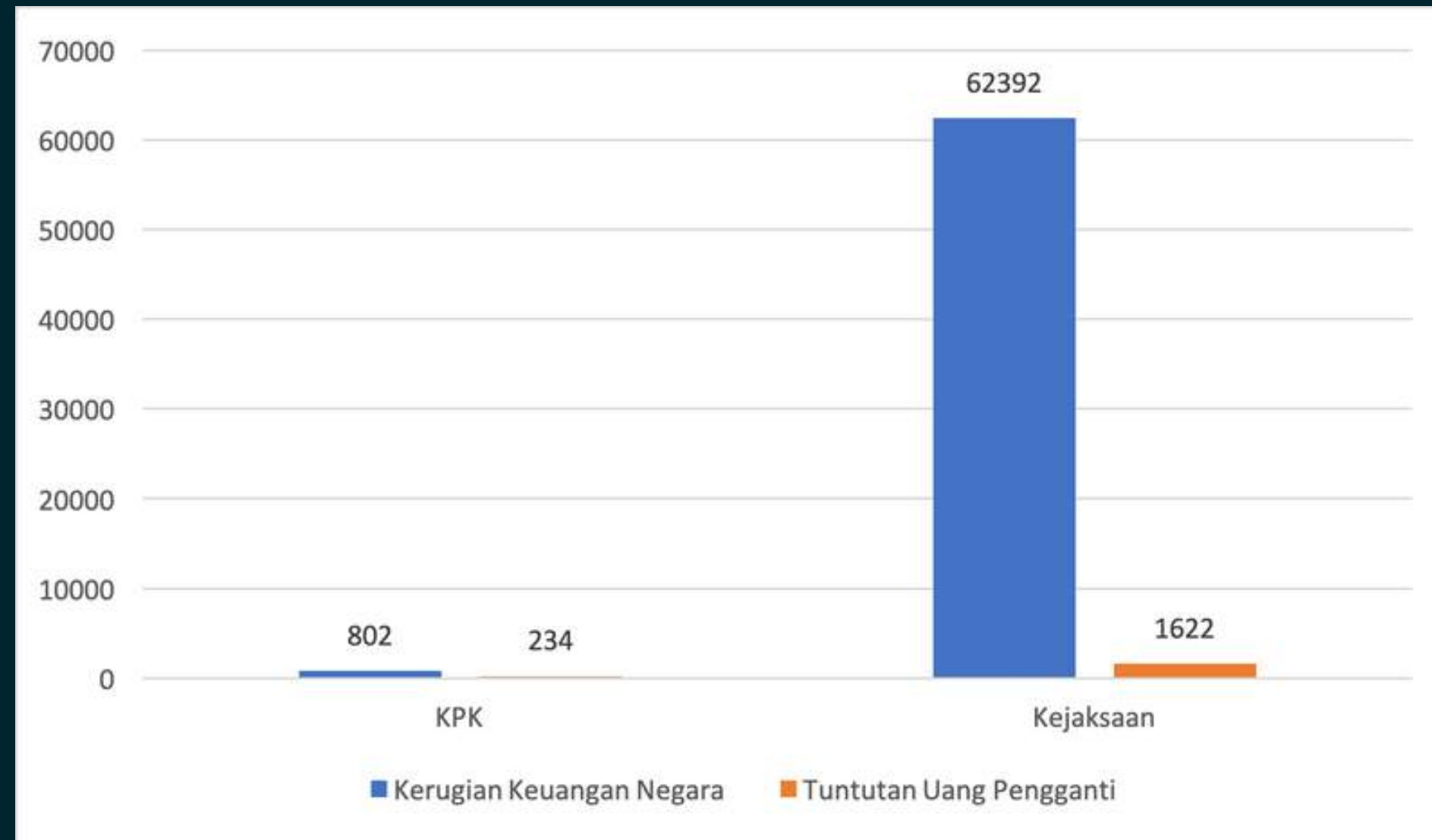
## *Tuntutan Denda di Bawah Ketentuan Undang-Undang*

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Tuntutan Denda	Pasal Tuntutan	Penuntut Umum
1	20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr	Rusdy Radjab	PPK Dinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Timur	Rp 100 juta	Pasal 2 ayat (1)	Kejaksaan
2	34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg	Soleman Tamo	PPK Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya	Rp 50 juta	Pasal 2 ayat (1)	Kejaksaan
3	11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb	Emmy	Swasta	Rp 50 juta	Pasal 2 ayat (1)	Kejaksaan
4	24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg	Moh Hamdun	Komisaris PT Gilang Pilar Nusantara	Rp 50 juta	Pasal 2 ayat (1)	Kejaksaan
5	10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl	Frentin Sabanon	Kepala Desa Semelako	Rp 50 juta	Pasal 2 ayat (1)	Kejaksaan

Dari total 587 terdakwa yang dituntut dengan Pasal 2 UU Tipikor, 33 orang diantaranya dikenakan denda Rp 50 juta dan Rp 100 juta. Padahal regulasi itu mengharuskan penegak hukum tunduk dengan hukuman denda paling sedikit Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Total uang pengganti yang dituntut selama proses persidangan tahun 2021 sebesar Rp 2,1 triliun





Kejaksaan maupun KPK belum menunjukkan performa maksimal dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Maka dari itu, ke depan, pelacakan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan, bahkan beserta keuntungannya harus dimasukkan ke dalam tuntutan uang pengganti.

## Tuntutan Uang Pengganti Besar

No	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Tuntutan Uang Pengganti	Penuntut Umum
1	Iwan Ratman	Direktur PT Mahakam Gerbang	Rp 50 miliar	Rp 50 miliar	Kejaksaan
2	Jasmina Julie	Direktur Utama PT Jazmina Asri Kreasi	Rp 95,4 miliar	Rp 57,3 miliar	Kejaksaan
3	Rennier A Latif	Komisaris PT Aditya Tirta Renata	Rp 150,5 miliar	Rp 155,2 miliar	Kejaksaan
4	Maria Pauline L	Pemilik PT Gramaindo Mega Indonesia	Rp 1,24 triliun	Rp 185,8 miliar	Kejaksaan
5	Idris Rolobessy	Direktur Umum PT. BPD Maluku	Rp 229,4 miliar	Rp 229,4 miliar	Kejaksaan

No	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara/Suap	Tuntutan Uang Pengganti	Penuntut Umum
1	Didi Laksamana	Dirut PT Abadi Sentosa Perkasa	Rp 20 miliar	Rp 37,7 miliar	KPK
2	Lissa Rukmi Utari	Komisaris Utama PT Amestis Indogeo Perakarsa	Rp 179 miliar	Rp 45,7 miliar	KPK
3	Nurhadi	Sekretaris Mahkamah Agung	Rp 49,4 miliar	Rp 83 miliar	KPK
4	Hadinoto Soedigno	Direktur Teknik PT Garuda Indonesia	Rp 70 miliar	Rp 88 miliar	KPK
5	Melia Boentaran	Direktur Komisaris PT Arta Niaga Nusantara	Rp 156 miliar	Rp 110,5 miliar	KPK

*Disparitas Tuntutan*



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : SE-003/A/JA/02010**

**TENTANG  
PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Sehubungan telah ditetapkannya Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, maka untuk mencegah atau meminimalkan disparitas tuntutan pidana, dipandang perlu ditetapkan pedoman penuntutan tindak pidana korupsi, sebagai berikut :

- I. Tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  1. Untuk kerugian keuangan negara paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdakwa dituntut :
    - 1.1 Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari 75% sampai dengan paling banyak 100%; dan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dari hasil kejahatannya 0% sampai dengan paling banyak 25%, **dengan pidana penjara paling singkat 4**

1. Pedoman penuntutan tidak mempertimbangkan latar belakang pekerjaan terdakwa dan dampak atas kejahatan
2. Pedoman Jaksa Agung masih terbatas pada korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor).
3. Pengaturan tentang standar pidana penjara pengganti bagi terdakwa yang tidak melunasi pidana tambahan uang pengganti tidak ada.
4. Pada bagian yang mengatur tentang pedoman penuntutan denda (angka VI dan VII), tidak mengatur spesifik jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa.

*Pedoman penuntutan milik KPK tidak akan dibahas, sebab, hingga saat ini substansi aturan tersebut belum bisa ditemukan.*

## Disparitas Tuntutan Penjara

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara/Suap	Tuntutan Penjara	Pasal
1	26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bjm	Mahyudiansyah	Kepala Dinas Perdagangan Kab. Kotabaru	Rp 2,2 miliar	1 tahun 6 bulan	Pasal 3
2	25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna	Amri Yanto	Bendahara Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Kab Aceh Tengah	Rp 398 juta	3 tahun 6 bulan	Pasal 3
3	36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg	Junaedi	Dirut PD Sindangkasih Multi Usaha	Rp 1,4 miliar	2 tahun	Pasal 3
4	16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	Asran Siregar	Kepala Cabang PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang	Rp 667 juta	3 tahun	Pasal 3
5	5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr	H Suwandi	Anggota DPRD Kalimantan Timur	Rp 401 juta	1 tahun 6 bulan	Pasal 11
6	14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr	Ahmad Muttakin	Kepala Desa Bukit Tinggi Lombok Barat	Rp 53 juta	1 tahun 6 bulan	Pasal 11

## Disparitas Tuntutan Denda

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara/Suap	Tuntutan Denda	Pasal
1	51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	Jamotan Silaen	Kepala Desa Tornagodang	Rp 145 juta	Rp 100 juta	Pasal 3
2	47/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr	Husaepa	Kepala Desa Sungai Upih	Rp 900 juta	Rp 50 juta	Pasal 3
3	10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg	Sutjahjo Hari Murti	Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Pemko Batam	Rp 685 juta	Rp 50 juta	Pasal 11
4	43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks	Muhammad Said	Kepala UPT – Pusat Layanan Usaha Lorong Kanrerong	Rp 131 juta	Rp 50 juta	Pasal 11
5	23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk	Ahmad Khalil	Tim sukses calon anggota legislatif	Rp 100 juta	Rp 200 juta	Pasal 5 ayat (1) huruf a
6	50/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Joko S Tjandra	Pengusaha	Rp 15 miliar	Rp 100 juta	Pasal 5 ayat (1) huruf a

## *Disparitas Pidana Penjara Pengganti*

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Uang Pengganti	Tuntutan Pidana Penjara Pengganti	Penuntut Umum	Pasal
1	19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg	Aries HB	Rp 3 miliar	1 tahun	KPK	Pasal 12 huruf a
2	39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr	Musyaffa	Rp 780 juta	1 tahun	KPK	Pasal 12 huruf a
3	60/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Budi Santoso	Rp 2 miliar	2 tahun	KPK	Pasal 2 ayat (1)
4	25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr	Melia Boentaran	Rp 110 miliar	2 tahun	KPK	Pasal 2 ayat (1)
5	45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Kasmin	Rp 1 miliar	1 bulan	Kejaksaan	Pasal 2 ayat (1)
6	15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk	Supratikno	Rp 190 juta	2 tahun	Kejaksaan	Pasal 2 ayat (1)
7	49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg	Fransiscus Nanga Roka	Rp 107 juta	4 tahun	Kejaksaan	Pasal 3
8	47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks	Ernawati	Rp 6,8 miliar	1 tahun	Kejaksaan	Pasal 3

Pedoman pengaturan standar penjatuhan pidana penjara pengganti harus segera dibuat. Hal ini penting sebagai ganjaran bagi terpidana yang tidak melunasi pembayaran uang pengganti. UU Tipikor pada dasarnya tidak membatasi penjatuhan pidana penjara pengganti, selama masih sesuai dengan muatan pasal tuntutan. Jadi, jika kerugian keuangan negaranya besar, terdakwa harus dituntut dengan pidana penjara pengganti yang juga maksimal.

## *Menyimpang dari SEJA Pedoman Penuntutan*

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Kerugian Negara	Tuntutan Uang Pengganti	Tuntutan Penjara	Pasal
1	12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	Warsito	Rp 561 juta	Rp 561 juta	5 tahun 6 bulan	Pasal 2 ayat (1)
2	51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk	Khairul Anwar	Rp 2,4 miliar	Rp 2,4 miliar	6 tahun	Pasal 2 ayat (1)
3	10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte	Muhammad A. Abubakar	Rp 600 juta	Rp 600 juta	1 tahun 4 bulan	Pasal 3
4	36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks	Rinaldi Iksan Basong	Rp 838 juta	Rp 838 juta	1 tahun	Pasal 3

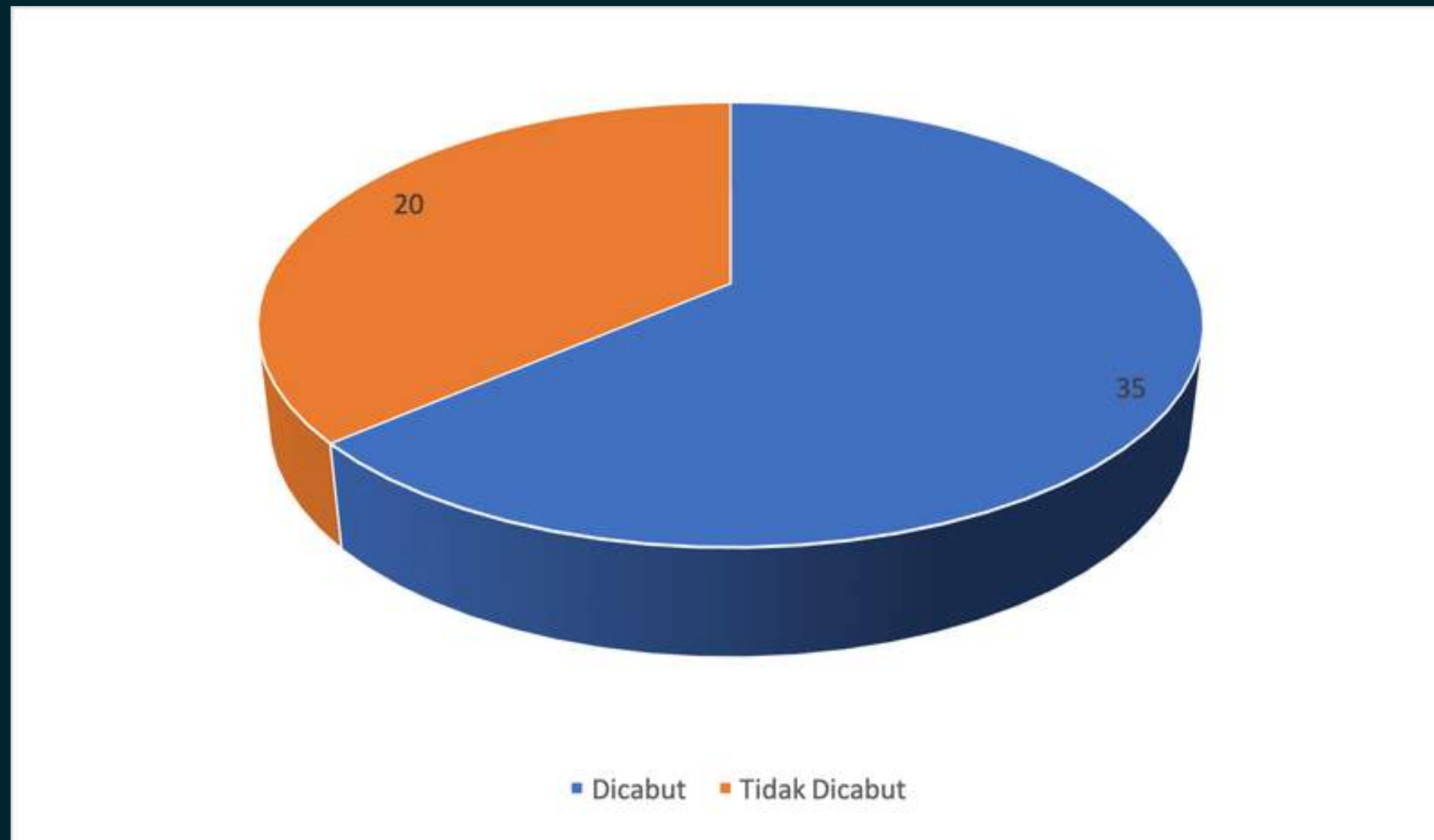
No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Tuntutan Denda	Pasal
1	51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk	Khairul Anwar	Teller Bank BNI	Rp 2,4 miliar	Rp 50 juta	Pasal 2 ayat (1)
2	24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps	I Gede Agung Pasrisak	Perbekel Desa Tianyar Barat	Rp 4,5 miliar	Rp 100 juta	Pasal 2 ayat (1)
3	21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb	Deni Kriswardana	Direktur PT Bunga Tanjung Raya	Rp 11,2 miliar	Rp 300 juta	Pasal 2 ayat (1)
4	43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst	Santoso	Direktur PT Sakti Mas Mulia	Rp 48,2 miliar	Rp 200 juta	Pasal 2 ayat (1)
5	8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk	Marthen P Erari	Bendahara BPS Mansinam	Rp 5,5 miliar	Rp 100 juta	Pasal 3



*Tuntutan Pencabutan Hak Tertentu*



## Tuntutan Pencabutan Hak Politik



1. Penuntut umum sudah cukup baik dalam mengimplementasikan pencabutan hak politik.
2. Dari total 55 terdakwa yang berasal dari lingkup politisi atau pejabat publik, lebih dari setengahnya dituntut dengan pidana tambahan tersebut. Adapun 35 terdakwa tersebut berlatar belakang jabatan seperti anggota BPK RI (1 orang), menteri (2 orang), kepala daerah (5 orang), dan sisanya berasal dari anggota legislatif.
3. Seluruh tuntutan pencabutan hak politik itu berasal dari KPK.

*Hukuman tambahan ini sebagai salah satu cara untuk menjerakan pelaku dan upaya melindungi masyarakat dari calon-calon bermasalah saat mengikuti gelaran pemilihan umum.*

## *Tidak Dituntut Pencabutan Hak Politik*

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara/Suap	Penuntut Umum
1	84/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby	Rendra Kresna	Bupati Malang	Rp 6,3 miliar	KPK
2	83/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby	Taufiqurrahman	Bupati Nganjuk	Rp 25,6 miliar	KPK
3	5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	Kharruddin Syah	Bupati Labuhanbatu Utara	Rp 3 miliar	KPK
4	46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	M Syahrial	Walikota Tanjungbalai	Rp 1,6 miliar	KPK
5	74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Budi Budiman	Walikota Tasikmalaya	Rp 700 juta	KPK

## *Mencabut Hak sebagai ASN*

Penuntut umum harus turut memasukkan pencabutan hak sebagai ASN kepada majelis hakim. Hal ini penting, mengingat problematika pelaku korupsi yang berasal dari ASN namun tetap menduduki jabatan selalu mengemuka setiap tahunnya. Padahal, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN telah secara eksplisit menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan inkracht karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan.



Juliari P Batubara  
Rp 32,4 miliar  
11 tahun



Edhy Prabowo  
Rp 25,7 miliar  
5 tahun

## *Tuntutan Bermasalah*



Pinangki Sirna Malasari  
Rp 6,3 miliar  
4 tahun



Joko S Tjandra  
Rp 15 miliar  
4 tahun

TREN VONIS 2021

# PART VII

## *Pemetaan Vonis*

01

## Penggunaan Pasal Putusan

Pemetaan ini akan melihat penggunaan pasal UU Tipikor dan UU TPPU dalam putusan

03

## Berat Ringan Hukuman

Isu ini akan mengulas kuantitas terdakwa yang dihukum ringan, sedang, dan berat

05

## Pencabutan Hak Politik

Hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik sepanjang tahun 2021 akan dibahas

07

## Disparitas & Pedoman Pemidanaan

Fenomena disparitas pidana dan penerapan pedoman pemidanaan MA akan dibahas

09

## Problematika Peninjauan Kembali

Ulasan mengenai fenomena pengurangan hukuman pada tingkat PK

02

## Rata-Rata Hukuman

Bagian ini akan melihat rata-rata hukuman penjara sepanjang persidangan tahun 2021

04

## Vonis Bebas dan Lepas

Bagian ini akan mengulas jumlah terdakwa yang divonis bebas dan lepas serta pemetaan pengadilannya

06

## Pidana Penjara Pengganti

Hukuman tambahan bagi terpidana yang tidak melunasi uang pengganti akan diulas

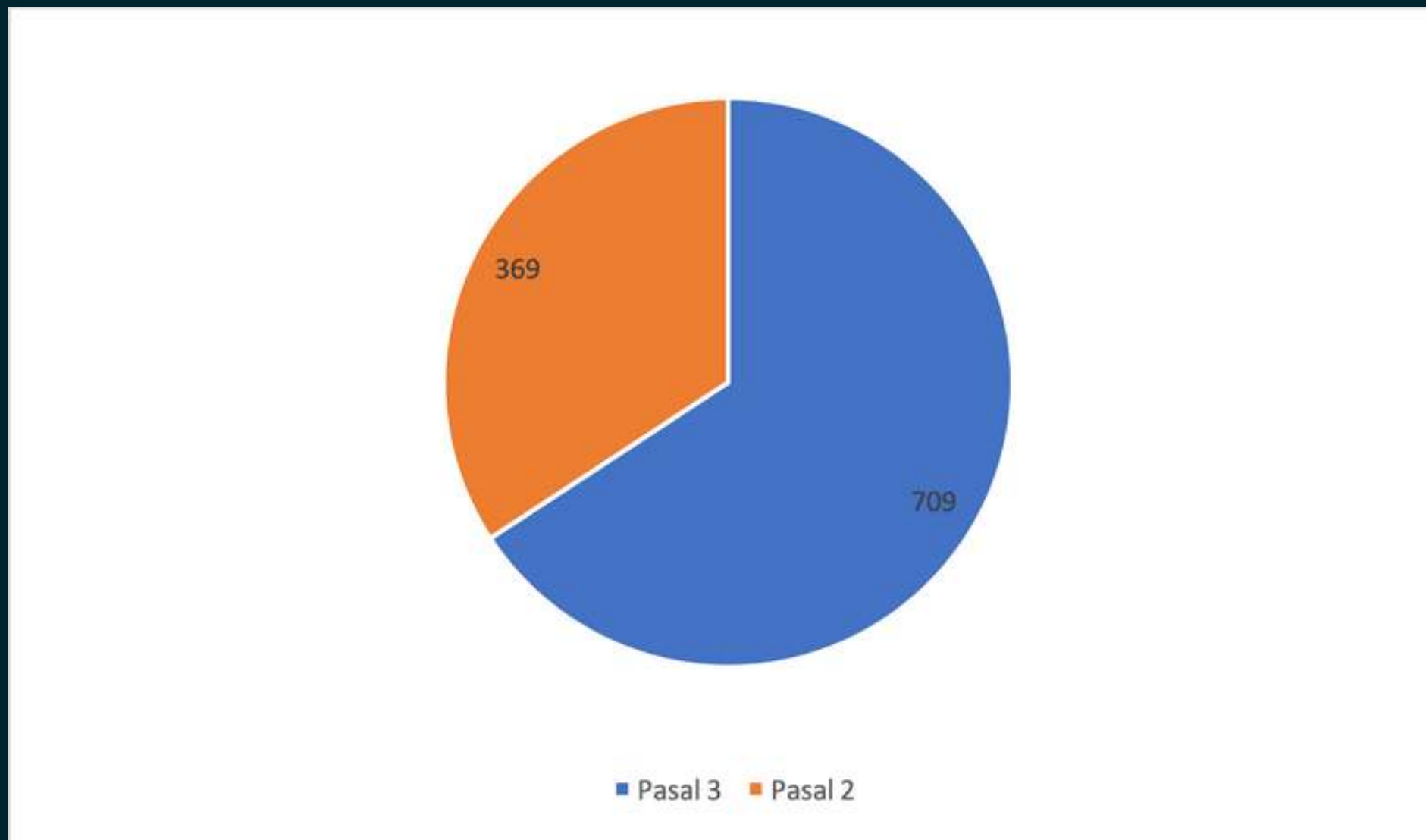
08

## Pertimbangan Hukuman Ganjil

Ulasan majelis hakim yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat saat memutus perkara akan dibahas

# *Penggunaan Pasal Putusan*





Temuan ini selalu mengemuka setiap tahun. Majelis hakim kerap memilih pasal-pasal yang menguntungkan terdakwa, salah satunya Pasal 3 UU Tipikor. Padahal, penuntut umum lebih banyak menggunakan Pasal 2 UU Tipikor.



## Tuntutan Pasal 2 - Vonis Pasal 3

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Kerugian Negara	Tuntutan	Vonis
1	36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rais Nasution	Rp 537 juta	5 tahun	1 tahun
2	18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb	Kumaidi	Rp 578 juta	6 tahun	1 tahun 6 bulan
3	67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Subadri	Rp 17,2 miliar	7 tahun	3 tahun
4	31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Kariyadi	Rp 4,2 miliar	9 tahun	1 tahun 6 bulan
5	25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr	Handoko Setiono	Rp 156 miliar	8 tahun	2 tahun

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Kerugian Negara	Tuntutan Denda	Vonis Denda
1	23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb	Jerry Tuhuleruw	Rp 4,3 miliar	Rp 300 juta	Rp 50 juta
2	6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Dedi Alkana	Rp 5,7 miliar	Rp 500 juta	Rp 50 juta
3	22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Ardiansyah	Rp 6,5 miliar	Rp 500 juta	Rp 50 juta
4	10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Ali Hasmi	Rp 5,7 miliar	Rp 750 juta	Rp 50 juta
5	9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb	Yoksan Batlayar	Rp 1,3 miliar	Rp 350 juta	Rp 50 juta

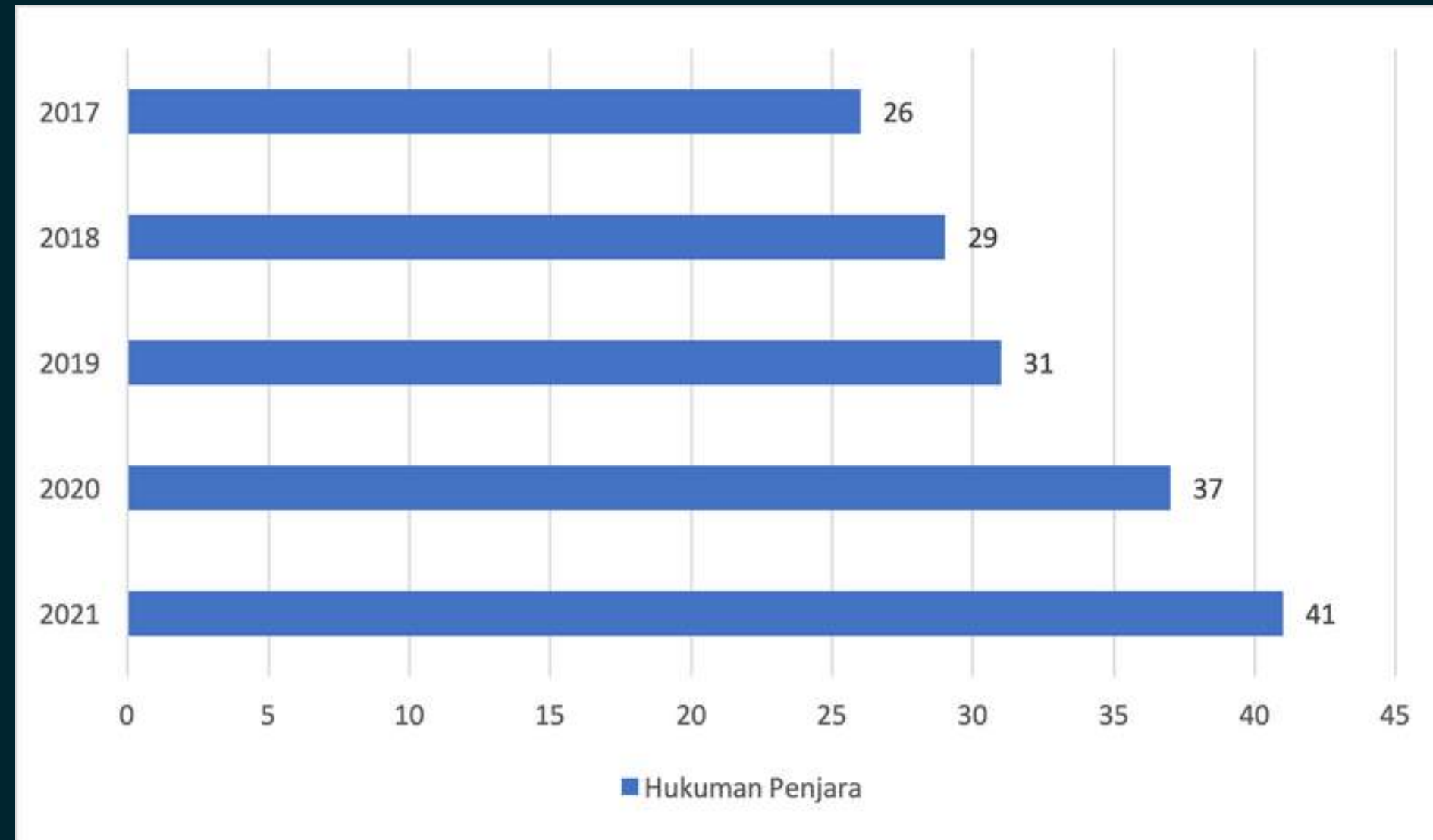
No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Pasal	Vonis
1	33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk	Muflihan	Kepala Desa Banjar Manis	Rp 1 miliar	Pasal 3	3 tahun 6 bulan
2	62/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Novi Farida	Kasubag Keuangan PDAM Karawang	Rp 2,6 miliar	Pasal 3	2 tahun 3 bulan
3	43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg	Ratih Nisya	Direktur CV Turus	Rp 1 miliar	Pasal 3	2 tahun 10 bulan
4	2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	Hotman Simanjuntak	Wakil Direktur III CV Dame Rumata	Rp 731 juta	Pasal 3	1 tahun 6 bulan
5	47/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr	Husaepa	Kepala Desa Sungai Upih	Rp 900 juta	Pasal 3	3 tahun

SEMA 3/2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 3/2018). Pada angka romawi I Rumusan Hukum Kamar Pidana huruf f angka 1 dan 2 halaman 5 menyebutkan bahwa jika perkara korupsi memiliki kerugian keuangan negara di atas Rp 200 juta, maka hakim menerapkan Pasal 2 UU Tipikor. Sedangkan kerugian keuangan negara di bawah Rp 200 juta maka ketentuan yang digunakan adalah Pasal 3 UU Tipikor.

*Jika dijumlah, maka sepanjang tahun 2021 setidaknya terdapat 558 terdakwa yang diputus berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor dan kerugian keuangan negaranya di atas Rp 200 juta.*

*Rata-Rata Hukuman*

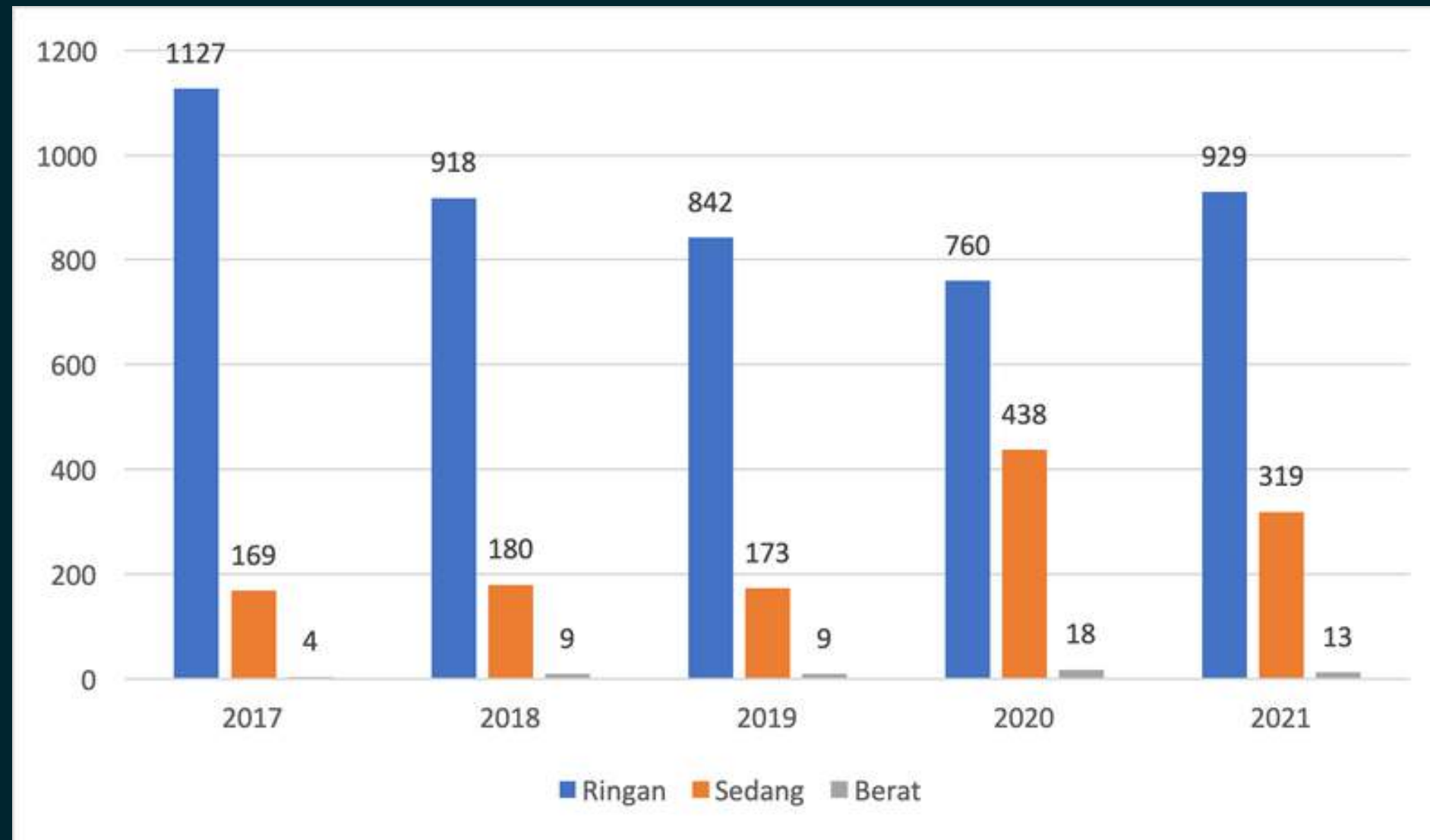
Rata-rata hukuman terdakwa korupsi sepanjang tahun 2021 hanya 3 tahun 5 bulan penjara

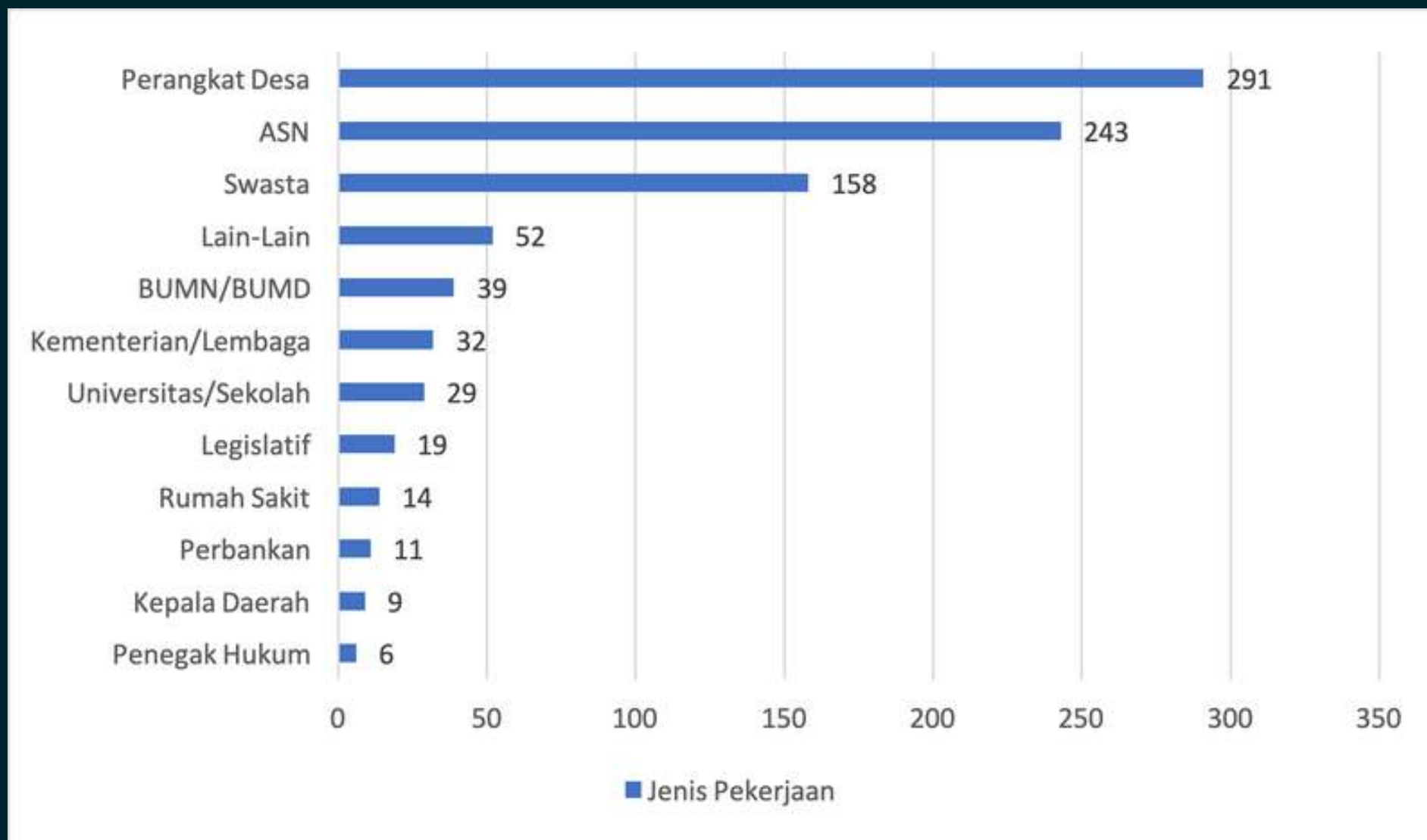


Sekalipun naik ketimbang tahun-tahun sebelumnya, namun hukuman 3 tahun 5 bulan penjara sama sekali tidak menggambarkan pemberian efek jera. Jargon berpihak pada pemberantasan korupsi pada faktanya hanya isapan jempol semata. Data tersebut praktis tidak lagi mengejutkan masyarakat, sebab, fenomena pemotongan hukuman memang sangat terlihat pada sepanjang tahun 2021 lalu.

*Berat Ringan Hukuman*

# Berat Ringan Hukuman





- Sejumlah 80 persen perangkat desa yang diproses hukum dihukum ringan.
- Klaster ASN jumlah hukuman ringannya mencapai 70 persen dari total keseluruhan.
- Lebih dari setengah kepala daerah dan legislatif dihukum ringan

*Majelis hakim belum memiliki frekuensi yang sama terkait pemberatan hukuman tatkala pelaku berasal dari kalangan abdi negara. Hal ini penting mengingat mereka terikat sumpah jabatan dan diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan.*



## Kerugian Keuangan Negara x Vonis

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis
1	69/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Dadang Suganda	Swasta	Rp 69 miliar	4 tahun
2	25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr	Melia Boentaran	Direktur PT Arta Niaga Nusantara	Rp 156 miliar	4 tahun
3	48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks	Andi Ade Ariadi	ASN	Rp 11,6 miliar	2 tahun 4 bulan
4	37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks	Albert Simon D	PPAT	Rp 900 juta	1 tahun 8 bulan
5	47/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr	Husaepa	Kepala Desa Sungai Ipih	Rp 900 juta	1 tahun 4 bulan

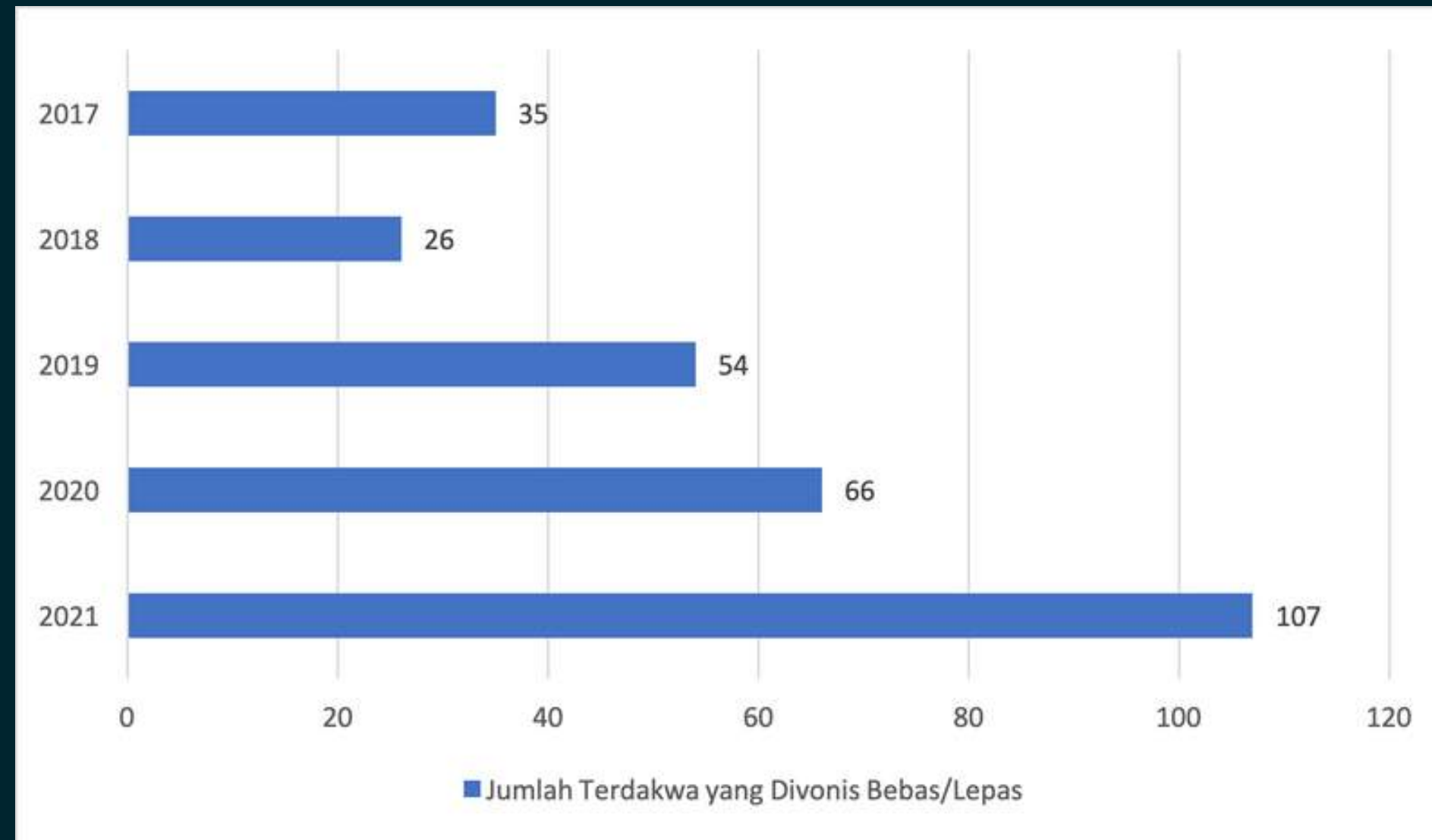
Pertimbangan kerugian perekonomian negara yang luput dari majelis hakim memperlihatkan disorientasi pertimbangan putusan perkara korupsi. Bagaimana tidak, akar persoalan korupsi merupakan penambahan kekayaan yang berdampak pada kerugian keuangan negara, bahkan disebutkan dalam UU Tipikor menghambat pembangunan nasional.

No	Nama Pengadilan	Total Vonis Ringan
1	PN Bandung	75
2	PN Makassar	58
3	PN Medan	58
4	PN Palembang	45
5	PN Surabaya	45
6	PN Banda Aceh	43
7	PN Kupang	41
8	PN Samarinda	38
9	PN Jakarta	36
10	PN Banjarmasin	35

Tren hukuman ringan pada setiap pengadilan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Mahkamah Agung untuk lebih menegaskan sikap keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi. Sekaligus bisa digunakan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tidak lagi memberikan perkara-perkara besar, baik dari sisi kerugian negara atau latar belakang pekerjaan terdakwa, kepada hakim-hakim yang kerap memberikan vonis ringan.

*Vonis Bebas dan Lepas*

Sepanjang tahun 2021 setidaknya 107 terdakwa divonis bebas dan lepas

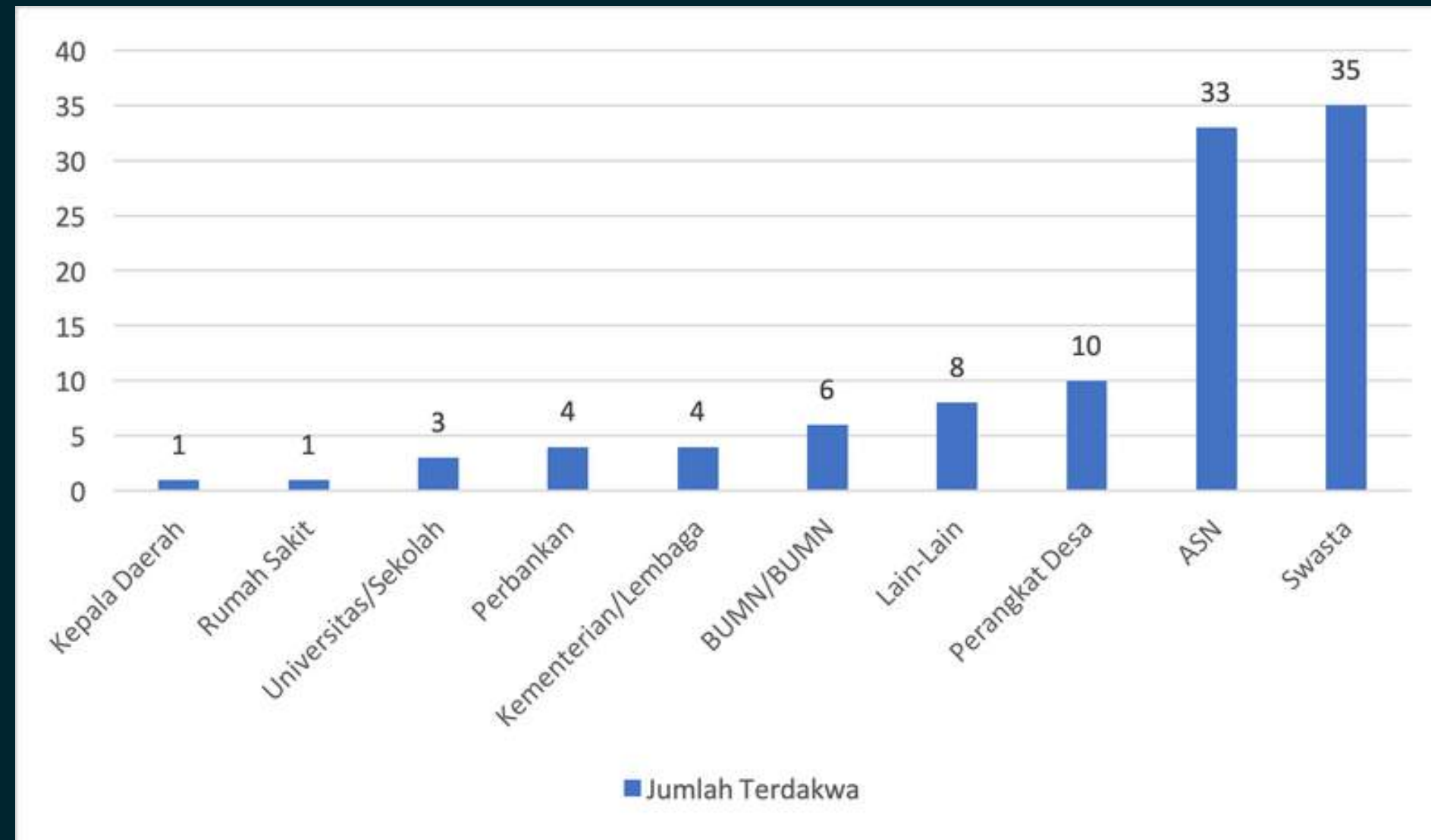


Ini mestinya menjadi sinyal pembelajaran serta evaluasi bagi penegak hukum untuk memastikan perkara-perkara yang disidangkan dapat meyakinkan majelis hakim melalui mekanisme pembuktian. Selain itu, vonis bebas dan lepas yang meningkat tajam ini juga harus menjadi perhatian dari pemangku kepentingan di bidang pengawasan, baik Bawas MA maupun KY, guna melihat apakah ada pelanggaran etik atau hukum dari putusan-putusan tersebut. Kemudian, aspek lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dari penegak hukum untuk memastikan proses persidangan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, terutama memitigasi adanya praktik korupsi.

No	Nama Pengadilan	Jumlah Terdakwa Bebas/Lepas
1	PN Makassar	12
2	PN Aceh	12
3	PN Bandung	9
4	PN Palu	7
5	PN Kupang	5
6	PN Pangkal Pinang	5
7	PN Manado	5
8	PN Medan	5
9	PN Padang	5
10	PN Banjarmasin	4

Peningkatan signifikan vonis bebas tahun 2021 didominasi oleh putusan dari Pengadilan Tipikor Makassar dan Pengadilan Tipikor Aceh. Ini bukan hal baru lagi, sebab, dua pengadilan tersebut juga sempat muncul dalam pemantauan ICW pada tahun sebelumnya.

## Latar Belakang Pekerjaan Terdakwa Vonis Bebas dan Lepas



akibat perbuatan terdakwa-terdakwa itu negara telah dirugikan sebesar Rp 256,3 miliar.  
Nilai tersebut belum dihitung dari total penyuaan yang mencapai Rp 6 miliar.

*Pencabutan Hak Politik*



No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Tuntutan Pencabutan Hak Politik	Vonis Pencabutan Hak Politik	PN
1	30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg	Ajay M Priatna	Walikota Cimahi	5 tahun	-	PN Bandung
2	55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg	AA Umbara	Bupati Bandung Barat	5 tahun	-	PN Bandung
3	66/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Rizal Djalil	Anggota BPK	3 tahun	-	PN Jakarta
4	19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg	Aries HB	Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim	5 tahun	-	PN Palembang

Dari total terdakwa yang dituntut pencabutan hak politik, ternyata majelis hakim tidak mengabulkan seluruhnya, atau hanya 31 orang.

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Tuntutan Pencabutan Hak Politik	Vonis Pencabutan Hak Politik	PN
1	45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks	Nurdin Abdullah	Gubernur Sulawesi Selatan	5 tahun	3 tahun	PN Makassar
2	30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal	Wenny Bukamo	Bupati Banggai Laut	3 tahun	2 tahun 6 bulan	PN Palu
3	29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg	Abdul Rozaq Muslim	Anggota DPRD Jawa Barat	3 tahun	2 tahun	PN Bandung
4	59/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg	Siti Aisyah Tuti Handayani	Anggota DPRD Jawa Barat	3 tahun	2 tahun	PN Bandung
5	58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg	Ade Barkah Surahman	Anggota DPRD Jawa Barat	3 tahun	2 tahun	PN Bandung
6	26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst	Edhy Prabowo	Menteri Kelautan dan Perikanan	4 tahun	3 tahun	PN Jakarta
7	15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr	Zulkifli	Walikota Dumai	5 tahun	2 tahun	PN Pekanbaru

Alih-alih memperberat tuntutan pencabutan hak politik pelaku korupsi, terlihat putusan majelis hakim justru banyak meringankan hukuman tambahan tersebut.

*Pidana Penjara Pengganti*

Rata-rata pidana penjara pengganti sepanjang tahun 2021 hanya 1 tahun 2 bulan penjara

## Disparitas Pidana Penjara Pengganti

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Uang Pengganti	Pidana Penjara Pengganti
1	23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg	Otong Iskandar	Direktur CV Jaya Prima	Rp 20 juta	3 bulan
2	11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap	Yeffry Yemmy	Kepala Kantor Kas Bank Papua Distrik Suator	Rp 702 juta	3 bulan
3	59/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg	Hubertus Ngondus	Kepala Sekolah SMPN 1 Reok	Rp 25 juta	6 bulan
4	8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb	Pridayatnim Supriyatna	Pelaksana Customer Service PT. Bank Maluku	Rp 1 miliar	6 bulan
5	34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr	Teguh Sugiarto	Kaur Pembangunan Desa Sari Nadi	Rp 84 juta	9 bulan
6	8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap	Leonard Paul	Bendahara Penerima RSUD Abepura	Rp 1,5 miliar	9 bulan
7	71/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Paino	Asisten Manajer Ahli Pertanahan Pertamina Region Jawa	Rp 30 juta	1 tahun
8	19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg	Aries HB	Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim	Rp 8,4 miliar	1 tahun

*Disparitas dan Pedoman Pemidanaan*

## Disparitas Pidana Penjara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis	Pasal
1	6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg	Askari	Kepala Desa Sukowarno	Rp 187 juta	8 tahun	Pasal 2 ayat (1)
2	89/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby	Danang P Asmoro	Kepala Desa Trucuk	Rp 780 juta	4 tahun	Pasal 2 ayat (1)
3	46/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Eri Sutanto	Kepala Desa Bayongbong	Rp 365 juta	6 tahun	Pasal 2 ayat (1)
4	76/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Jenal Asikin	Kepala Desa Munjul	Rp 881 juta	4 tahun	Pasal 2 ayat (1)
5	30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi	Mudiyanto	Kepala Dinas Kelautan Konawe	Rp 210 juta	5 tahun	Pasal 2 ayat (1)
6	26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr	Jumadiyono	Kasubag Keuangan Kecamatan Kandis	Rp 1,1 miliar	4 tahun	Pasal 2 ayat (1)

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis	Pasal
1	21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg	Yaya Suryadi	Kepala Desa Rajadatu	Rp 256 juta	4 tahun	Pasal 3
2	30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm	Rooswandi Salem	Sekda Kab. Tanah Bumbu	Rp 1,8 miliar	1 tahun	Pasal 3
3	47/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Slamet Sribono	Pendamping Desa Satria Jaya	Rp 195 juta	4 tahun	Pasal 3
4	37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks	Albert Simon Dumanauw	PPAT	Rp 900 juta	1 tahun 6 bulan	Pasal 3
5	59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby	Imron Amirudin	Ketua Kelompok Masyarakat Singosari	Rp 161 juta	4 tahun	Pasal 3
6	36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg	Junaedi	Dirut PD Sindangkasih Multi Usaha	Rp 1,4 miliar	1 tahun 4 bulan	Pasal 3

## Disparitas Pidana Penjara Pasal Tindak Pidana Suap

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Suap	Vonis	Pasal
1	74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Budi Budiman	Walikota Tasikmalaya	Rp 700 juta	1 tahun	Pasal 5 ayat (1) huruf b
2	23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk	Ahmad Khalil	Tim Sukses	Rp 100 juta	2 tahun	Pasal 5 ayat (1) huruf a
3	5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	Kharruddin Syah	Bupati Labuhanbatu Utara	Rp 3 miliar	1 tahun 6 bulan	Pasal 5 ayat (1) huruf a
4	25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst	Fandry Gunawan	Sales PT Cherng Tay Indonesia	Rp 83 juta	1 tahun 6 bulan	Pasal 5 ayat (1) huruf b
5	10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg	Sutjahjo H Murti	Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Pemko Batam	Rp 685 juta	1 tahun 6 bulan	Pasal 11
6	38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr	Pitaya	Kepala Desa Sari Galuh	Rp 40 juta	1 tahun 6 bulan	Pasal 11
7	5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr	Suwandi	Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur 2010-2014	Rp 410 juta	1 tahun	Pasal 11
8	38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr	Lasdi	Kepala Desa Batang Batindih	Rp 30 juta	1 tahun 6 bulan	Pasal 11





SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG

PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3  
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

1. Pedoman pemidanaan baru terbatas pada tindak pidana korupsi dengan jenis kerugian keuangan negara.
2. Pedoman pemidanaan tidak mempertimbangkan latar belakang pekerjaan terdakwa
3. Mahkamah Agung tidak menjelaskan bentuk sanksi yang konkret jika kemudian majelis hakim menyimpangi pedoman pemidanaan

## Kategori Ringan

No	No Perkara	Nama	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis
1	37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks	Albert Simon D	PPAT	Rp 900 juta	1 tahun 6 bulan
2	12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby	Bambang Sugeng	Kepala Desa Kemantren	Rp 541 juta	1 tahun 3 bulan
3	12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst	Mark Sungkar	Ketua Umum PP Federasi Triathlon Indonesia	Rp 694 juta	1 tahun 6 bulan

Ringan (kerugian negara di atas Rp 200 juta, ancaman pidana minimal 4 tahun)

## Kategori Sedang

No	No Perkara	Nama	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis
1	30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm	Rooswandi Salem	Sekda Kab. Tanah Bumbu	Rp 1,8 miliar	1 tahun
2	65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby	Tjipto B Wibowo	Direktur CV Makmur Abadi	Rp 4 miliar	1 tahun 6 bulan
3	25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk	Pieter Thie	Direktur PT. Selatan Indah	Rp 1,7 miliar	1 tahun

Sedang (kerugian negara di atas Rp 1 miliar, ancaman pidana minimal 6 tahun)

## Kategori Berat

No	No Perkara	Nama	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis
1	43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst	Santoso	Direktur PT. Sakti Mas Mulia	Rp 48 miliar	6 tahun
2	69/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Dadang Suganda	Makelar Tanah	Rp 69 miliar	4 tahun

Berat (kerugian negara di atas Rp 25 miliar, ancaman pidana penjara minimal 8 tahun)

## Kategori Paling Berat

No	No Perkara	Nama	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis
1	25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr	Melia Boentaran	Direktur PT ANN	Rp 114 miliar	4 tahun

Paling berat (kerugian negara di atas Rp 100 miliar, ancaman pidana penjara minimal 10 tahun)

*Pertimbangan Hukuman Ganjil*



Juliari P Batubara  
Menteri Sosial RI

"Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina, oleh masyarakat"



Pinangki Sirna Malasari  
Jaksa

"Status terdakwa sebagai ibu dan mempunyai anak berusia 4 tahun layak diberi kesempatan mengasuh dan memberi kasih sayang dalam masa pertumbuhan anak"

"Terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik"



Edhy Prabowo  
Menteri KKP RI

"Terdakwa telah berjasa dalam pengembangan kemajuan MA"



Nurhadi  
Sekretaris MA

# *Problematika Peninjauan Kembali*



No	Nama	Pekerjaan	Hukuman PN	Hukuman PT	Hukuman Kasasi	Hukuman PK	Waktu vonis
1	Lucas	Pengacara	7 tahun	5 tahun	3 tahun	Bebas	8/4/2021
2	Tendrisyah	Swasta	6 tahun	-	-	4 tahun	19/4/2021
3	Basuki Hariman	Swasta	7 tahun	-	-	5 tahun 6 bulan	7/5/2021
4	Ng Fenny	Swasta	7 tahun	-	-	5 tahun 6 bulan	7/5/2021
5	Djoko Susilo	Anggota Polri	10 tahun	18 tahun	18 tahun	Pengembalian barang sitaan	8/5/2021
6	Rahudman Harahap	Walikota Medan	Lepas	-	10 tahun	Lepas	31/5/2021
7	Sri W Maria	Bupati Kep Talaud	4 tahun 6 bulan	-	-	2 tahun	9/6/2021
8	Dolly Paragutan	Direktur PTPN III	5 tahun	-	-	4 tahun	14/7/2021
9	Sulaeman Husen	Ketua DPRD Kab Banggai	Bebas	-	4 tahun	Bebas	3/11/2021
10	Agung Mangkunegara	Bupati Lampung Utara	7 tahun	-	-	5 tahun	3/11/2021
11	Aszwar	Swasta	2 tahun 6 bulan	6 tahun	6 tahun	3 tahun 6 bulan	8/11/2021
12	Johan A Muba	Swasta	5 tahun 10 bulan	-	-	4 tahun	16/11/2021
13	Suroto	Kepala Dusun	1 tahun 6 bulan	1 tahun 6 bulan	1 tahun 6 bulan	Lepas	19/11/2021
14	Remigo Y Berutu	Bupati Pakpak Barat	7 tahun	-	-	4 tahun	24/11/2021
15	Mikael Kambuaya	Kepala Dinas	5 tahun 6 bulan	6 tahun	-	3 tahun	22/12/2021

*15 terpidana dikurangi hukumannya pada tingkat Peninjauan Kembali*

TREN VONIS 2021

# PART VIII

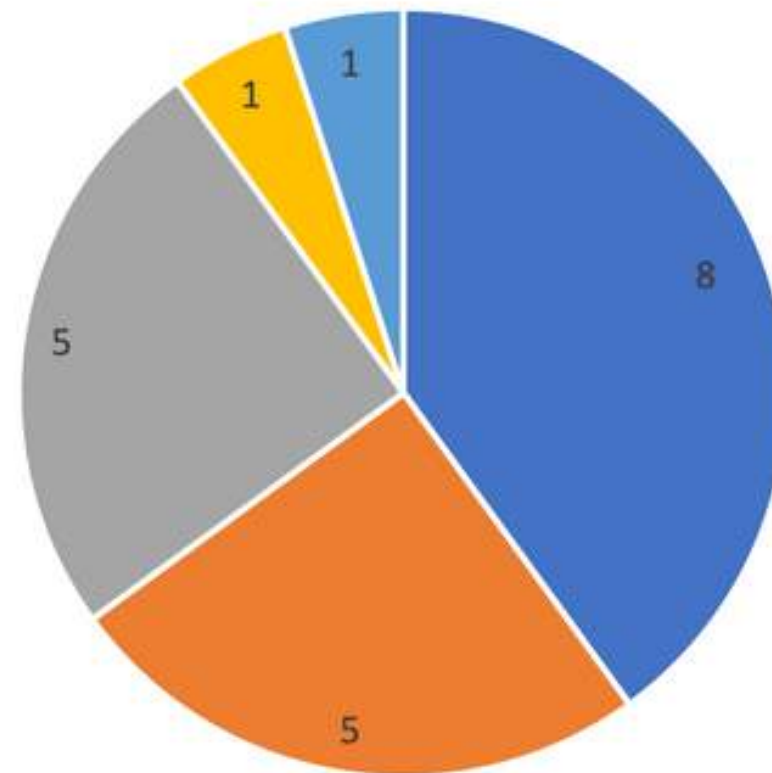
***Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19***



Sepanjang tahun 2021, setidaknya terdapat 24 terdakwa yang melakukan praktik korupsi dengan memanfaatkan anggaran Covid-19

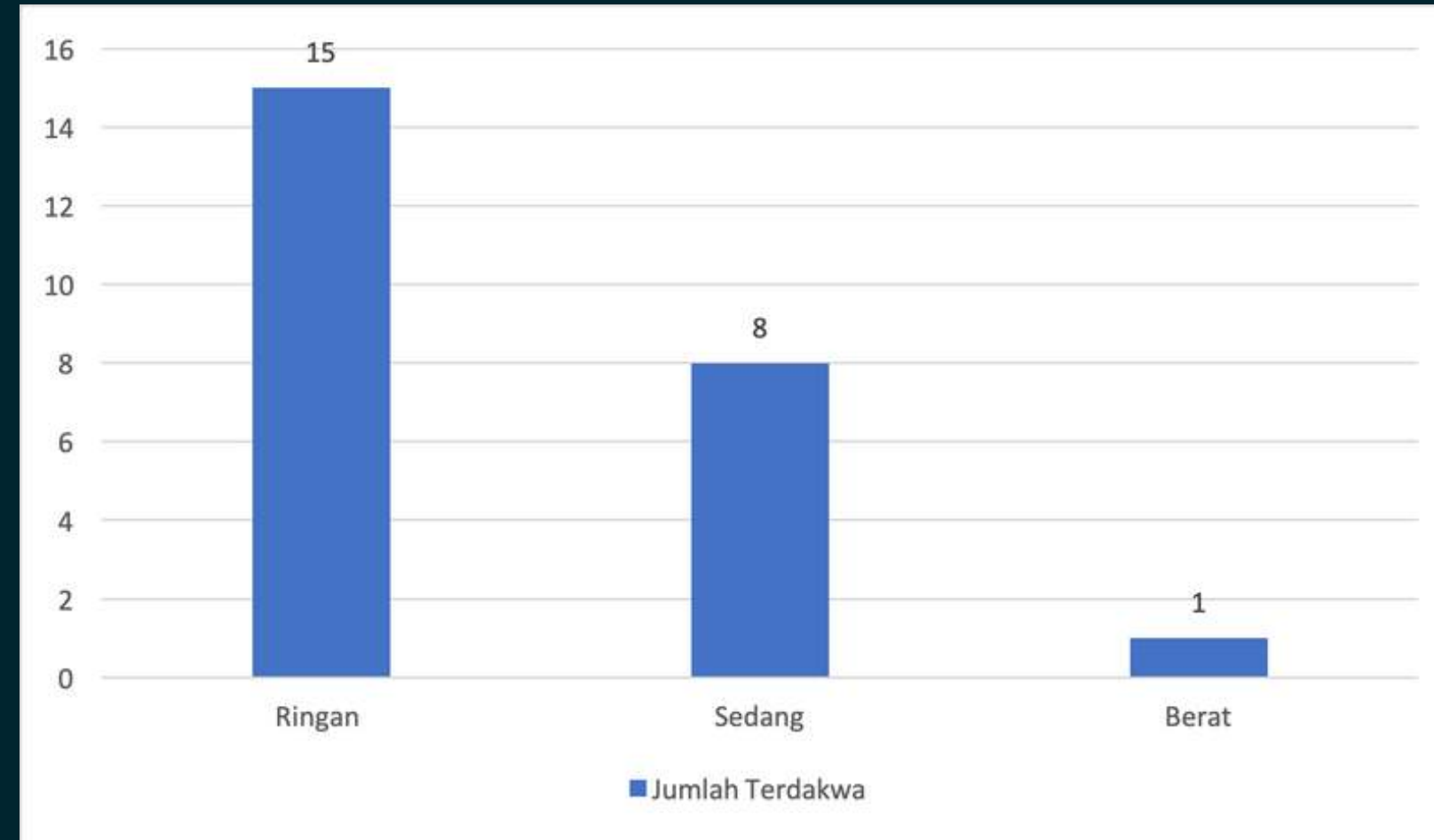
Jumlah kerugian negara yang timbul akibat praktik korupsi mencapai Rp 2,4 miliar.  
Sedangkan total suap yang terjadi sepanjang tahun 2021 sebesar Rp 39,5 miliar.

## Pemetaan berdasarkan Pasal Putusan



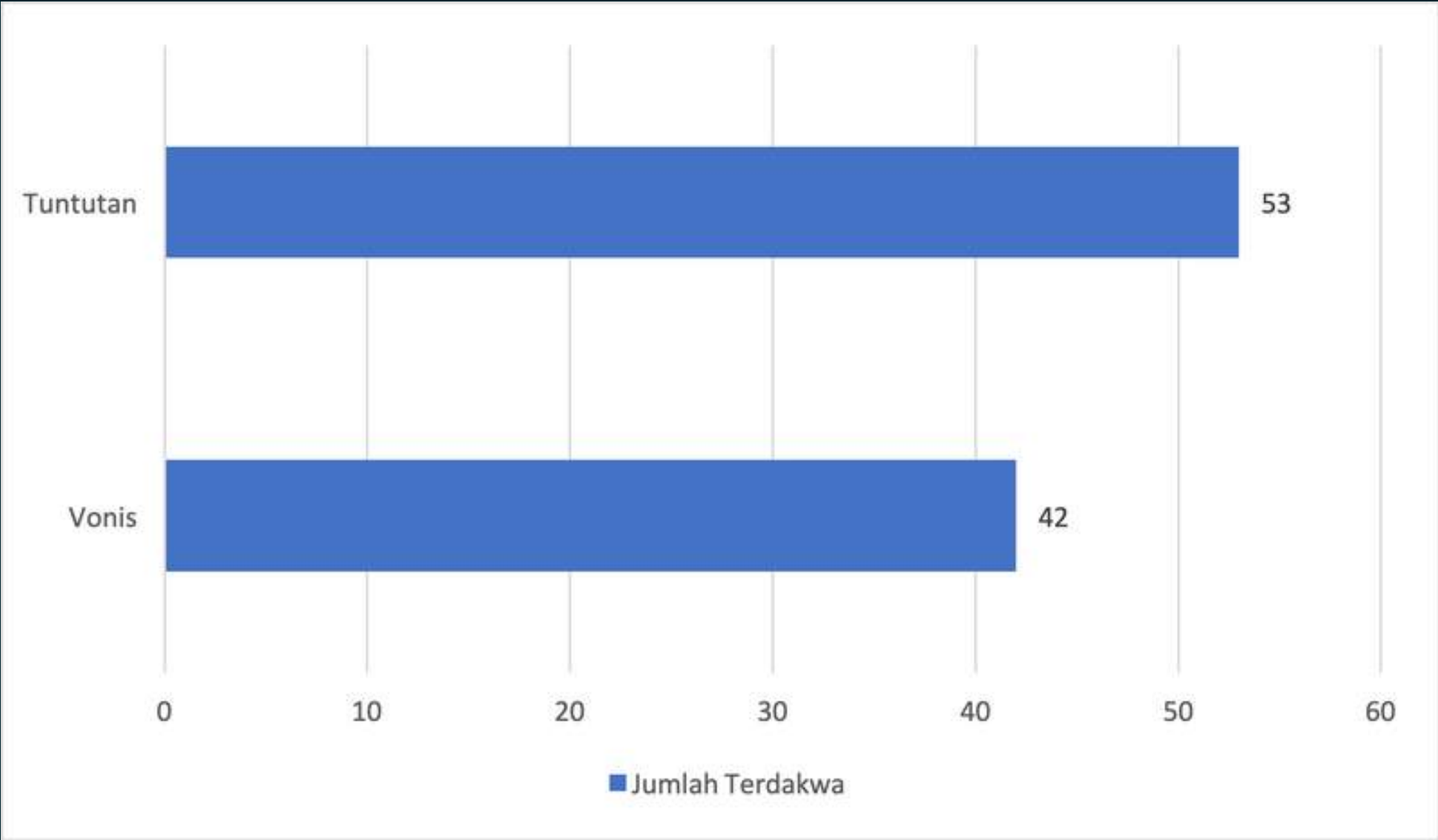
■ Pemerasan ■ Kerugian Negara ■ Suap ■ Benturan Kepentingan ■ Gratifikasi

*"Rata-rata tuntutan terdakwa korupsi pandemi Covid-19 hanya 4 tahun 5 bulan penjara"*



Tuntutan ringan masih mendominasi. Tiga putusan yang dijatuhkan majelis hakim menghukum lebih berat ketimbang tuntutan penuntut umum, diantaranya, Matheus J Santoso (dari 8 tahun menjadi 9 tahun penjara), Juliari P Batubara (dari 11 tahun menjadi 12 tahun penjara), dan Askari (dari 7 tahun menjadi 8 tahun penjara).

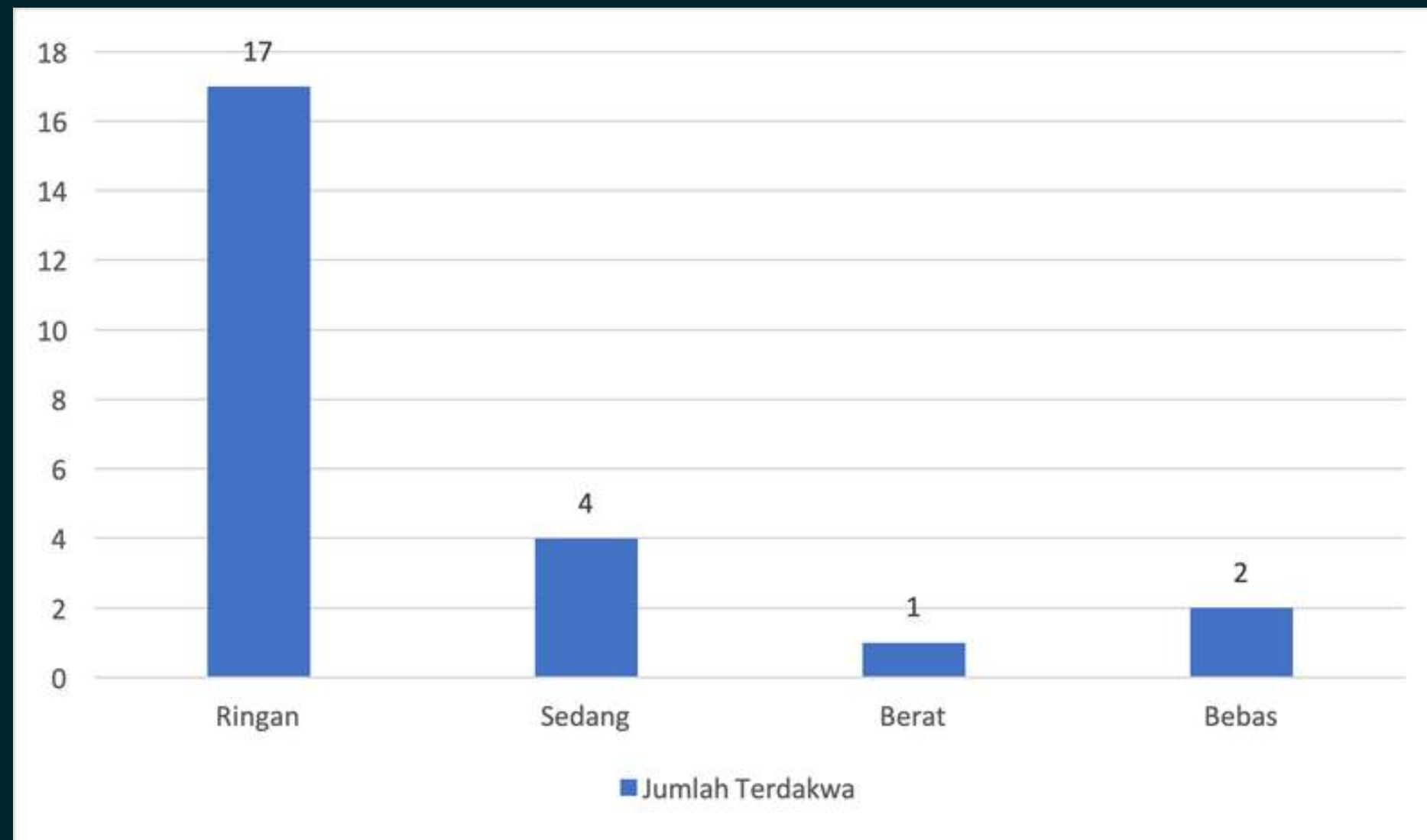
# Rata-rata vonis dan tuntutan terdakwa korupsi pandemi Covid-19



Rata-rata hukuman hanya 3 tahun 6 bulan penjara.

Dua terdakwa justru diganjar dengan hukuman bebas, yakni, Andri Wibawa dan M Totoh Gunawan. Keduanya diketahui didakwa bersama-sama dengan Bupati Bandung Barat melakukan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.

## Berat-Ringan Putusan





TREN VONIS 2021

# PART IX

## *Kesimpulan*

## Catatan Umum

- Dua sumber primer dalam pencarian data, yakni, SIPP dan Direktori Putusan MA terbilang buruk, karena, selain substansinya tidak lengkap, websitenya juga sulit untuk diakses.
- Pemantauan ICW tahun 2021 menghimpun 1.282 perkara yang disidangkan dengan jumlah terdakwa sebanyak 1.403 orang.
- Dengan menggunakan tolak ukur UU Kepemudaan, maka terdakwa berlatar belakang pemuda sebanyak 24 orang. Selebihnya berusia di atas 30 tahun.
- Perangkat desa paling banyak terlibat praktik korupsi dan disidangkan pada tahun 2021. Jumlahnya mencapai 363 orang kemudian secara berurutan diikuti oleh pemerintah daerah sebanyak 346 orang dan swasta dengan total 275 orang.
- KPK paling banyak menuntut pelaku dengan latar belakang pekerjaan dari klaster swasta (31 orang), kemudian anggota legislatif (24 orang), dan asal kementerian/lembaga (18 orang).
- Terdakwa yang berasal dari klaster politik, misalnya anggota legislatif, paling sedikit dituntut KPK jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019.
- Pemantauan ini tidak menemukan adanya tuntutan KPK terhadap aparat penegak hukum yang terlibat praktik korupsi.
- Kejaksaan menuntut terdakwa yang berasal dari klaster perangkat desa (363 orang). Selebihnya, pemerintah daerah (338 orang) dan swasta (243 orang).
- Kejaksaan Agung jauh mengungguli KPK dalam menangani korupsi yang memiliki kaitan dengan entitas korporasi.

Praktik korupsi terbanyak berasal dari klaster kerugian keuangan negara (1.188 terdakwa), lalu diikuti tindak pidana suap (116 terdakwa), dan penggelapan dalam jabatan (17 terdakwa). Untuk pasal yang berkaitan dengan pencucian uang, dari total 1.403 terdakwa, aparat penegak hukum hanya memasukkan regulasi itu kepada 12 terdakwa.

## Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Jumlah Kerugian dan Penerimaan Lainnya

- Kerugian keuangan negara dalam proses persidangan perkara tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 62,9 triliun. Jumlah tersebut melampaui tahun 2020 dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 56,7 triliun. Dari jumlah tersebut, KPK menangani perkara yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 802 miliar, selebihnya diusut oleh kejaksaan.
- Klaster politik (anggota legislatif dan kepala daerah) yang terjaring praktik korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,3 triliun. Sisanya dari lingkup BUMN/BUMD sebesar Rp 262 miliar dan perangkat desa sendiri menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 140 miliar.
- Tindak pidana suap dan gratifikasi sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 369 miliar. Sedangkan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan atau pungutan liar jumlahnya sebesar Rp 4,2 miliar. Untuk penggelapan dalam jabatan sendiri menimbulkan kerugian sebesar Rp 7,6 miliar.

## Pidana Tambahan Uang Pengganti dan Denda

- Pidana tambahan uang pengganti yang tertuang dalam putusan sepanjang tahun 2021 hanya berjumlah Rp 1,4 triliun. Sedangkan vonis pidana pokok seperti denda sebesar Rp 202,3 miliar.
- Penjatuhan hukuman uang pengganti terbesar terdapat dalam perkara yang melibatkan Maria P Lumowa sebesar Rp 158,5 miliar. Denda maksimal hanya dijatuhkan kepada 14 terdakwa.

- Korupsi kerugian keuangan negara, penuntut umum dominan menggunakan Pasal 2, ketimbang Pasal 3 UU Tipikor.
- Untuk penerapan UU TPPU, penuntut umum hanya menuntut 11 terdakwa saja.
- Dari total 1.403 terdakwa yang disidangkan, rata-rata tuntutan penuntut umum hanya 4,5 tahun penjara. Pembagian berdasarkan asal penuntut umum, maka rata-rata tuntutan KPK masih mengungguli kejaksaan, yakni 5 tahun 1 bulan penjara. Sedangkan Korps Adhyaksa tersebut hanya 4 tahun 6 bulan penjara.
- Rata-rata tuntutan terhadap pasal-pasal yang hukumannya maksimal 20 tahun penjara sebesar 4 tahun 7 bulan penjara. Sedangkan pasal yang hukumannya maksimal 5 tahun hanya 2 tahun 9 bulan penjara.
- Tuntutan penuntut umum masih menuntut ringan pelaku korupsi. Dari total 1.359 tuntutan yang dicatat, 662 orang diantaranya dituntut ringan. Sedangkan tuntutan dengan kategori sedang sejumlah 649 orang, dan untuk penjara di atas 10 tahun hanya 48 orang.
- Kejaksaan masih dominan menuntut ringan pelaku korupsi. Hal itu dibuktikan pada tahun 2021 Korps Adhyaksa tersebut menuntut ringan 623 terdakwa. Sedangkan kategori sedang berjumlah 587 terdakwa dan berat hanya 44 terdakwa. Untuk KPK, tuntutan didominasi kategori sedang dengan jumlah 62 terdakwa. Tuntutan ringannya sebanyak 39 terdakwa dan berat berjumlah 4 terdakwa.

- Terdakwa ASN mendominasi tuntutan ringan penuntut umum. Betapa tidak, dari total 662 orang, 189 diantaranya bekerja sebagai ASN. Menariknya, untuk klaster aparat penegak hukum, dari total 8 orang yang disidangkan, 6 orang diantaranya dituntut dengan hukuman ringan.
- Total tuntutan denda sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 281 miliar. Jika dirata-ratakan jumlahnya hanya Rp 207 juta per perkara. Praktis hanya 27 terdakwa saja yang dituntut dengan denda maksimal oleh penuntut umum, 6 orang diantaranya oleh KPK, sedangkan sisanya dituntut Kejaksaan.
- Dari total 587 terdakwa yang dituntut dengan Pasal 2 UU Tipikor, 33 orang diantaranya hanya dikenakan denda Rp 50 juta dan Rp 100 juta.
- Total uang pengganti yang dituntut selama proses persidangan tahun 2021 sebesar Rp 2,1 triliun. Jika dilihat berdasarkan lembaga asal penuntut umum, maka KPK menuntut uang pengganti sebesar Rp 535 miliar. Sisanya sebesar Rp 1,6 triliun dituntut oleh Kejaksaan.
- Sekalipun Kejaksaan dan KPK telah memiliki pedoman penuntutan, pemantauan ini turut mencuplik fenomena disparitas tuntutan, baik pemenjaraan, denda, maupun pidana penjara pengganti.
- Dari total 55 terdakwa yang berasal dari lingkup politisi atau pejabat publik, lebih dari setengahnya (35 orang) dituntut dengan pidana tambahan pencabutan hak politik. Adapun jika dilihat lebih lanjut, terdakwa-terdakwa tersebut berlatar belakang jabatan seperti anggota BPK RI (1 orang), menteri (2 orang), kepala daerah (5 orang), dan sisanya berasal dari anggota legislatif. Namun, yang menjadi catatan krusial, seluruh tuntutan pencabutan hak politik itu berasal dari KPK. Dari sini dapat dilihat bahwa Kejaksaan belum memiliki perspektif pemberian efek jera melalui pencabutan hak politik.
- Pemantauan ini turut melihat sejumlah penuntutan yang tergolong bermasalah. Sebab, tuntutannya bertolak belakang dengan substansi perkaranya dan latar belakang pekerjaan terdakwa. Adapun diantaranya, Pinangki, Joko S Tjandra, Edhy Prabowo, dan Juliari P Batubara.



- Terdapat 1.078 terdakwa yang divonis dengan pasal korupsi kerugian keuangan negara. Pembagiannya, 709 orang diantaranya divonis menggunakan Pasal 3 dan sisanya sebanyak 369 orang dikenakan Pasal 2 UU Tipikor.
- MA sempat berupaya mengatasi perbedaan hukuman Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor melalui penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 3/2018). Namun, pemantauan ini menemukan sejumlah putusan yang melanggar aturan tersebut.
- Rata-rata vonis tahun 2021 hanya 3 tahun 5 bulan penjara. Meskipun mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun hukuman tersebut sudah barang tentu tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku.
- Dari total 35 terdakwa yang dituntut pencabutan hak politik, ternyata majelis hakim tidak mengabulkan seluruhnya, atau hanya sekitar 31 orang.
- Dari 656 terdakwa yang dikenakan pidana penjara pengganti, rata-rata penjatuhan hukumannya hanya 1 tahun 2 bulan penjara.
- Berdasarkan kategori, vonis ringan mendominasi persidangan sepanjang tahun 2021. Rinciannya, 929 terdakwa divonis ringan, 319 terdakwa divonis sedang, dan 13 terdakwa divonis di atas 10 tahun penjara atau masuk kategori berat.



- Perangkat desa paling banyak dihukum ringan (291 orang). Secara persentase, 80 persen dari klaster perangkat desa dihukum di bawah 4 tahun penjara. Sedangkan ASN sendiri yang diganjar hukuman ringan sebanyak 243 orang atau 70 persen dari total keseluruhan. Untuk legislatif dan kepala daerah ganjaran hukuman ringan didapatkan lebih dari setengah jumlah pelaku klaster tersebut.
- Pemantauan ini menemukan sejumlah putusan pemenjaraan yang bertolak belakang dengan jumlah kerugian keuangan negara. Sederhananya, sejumlah putusan yang konstruksi perkaranya memiliki irisan kerugian keuangan negara besar, akan tetapi hanya divonis ringan.
- Pengadilan Tipikor Bandung paling banyak menghukum ringan pelaku korupsi (75 terdakwa). Kemudian diikuti Pengadilan Tipikor Makassar dan Medan (58 terdakwa).
- Vonis bebas dan lepas tahun 2021 menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemantauan ini menemukan setidaknya 107 terdakwa divonis bebas dan lepas. Sebagai perbandingan, tahun 2020 ICW mencatat vonis bebas dan lepas hanya dijatuhkan kepada 66 terdakwa.
- Pengadilan Tipikor Makassar dan Aceh diketahui paling sering memvonis bebas pelaku korupsi dengan jumlah sekitar 12 orang.
- Klaster pekerjaan terdakwa paling banyak divonis ringan ialah swasta (35 orang), ASN (33 orang), dan perangkat desa (10 orang). Jika ditotal, terdakwa-terdakwa dengan vonis bebas maupun lepas telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 256,3 miliar, sedangkan suap sebesar Rp 6 miliar.

- Setidaknya terdapat 24 terdakwa korupsi yang substansi perkaranya berkaitan dengan anggaran Covid-19.
- Jumlah kerugian negara timbul akibat praktik korupsi mencapai Rp 2,4 miliar. Sedangkan total suap yang terjadi sepanjang tahun 2021 sebesar Rp 39,5 miliar.
- Jika dilihat lebih lanjut berdasarkan jenis tipikor, maka data yang diperoleh sebagai berikut: 1) pemerasan (8 terdakwa); 2) kerugian keuangan negara (5 terdakwa); 3) suap-menyuap (5 terdakwa); 4) benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (1 terdakwa); 5) gratifikasi (1 terdakwa).
- Untuk tuntutan, rata-ratanya hanya 4 tahun 5 bulan penjara. Kalau dikategorikan, maka tuntutan ringan masih mendominasi dengan jumlah 15 terdakwa, sedangkan yang dituntut sedang 8 terdakwa, dan tuntutan berat hanya 1 terdakwa. Keseluruhan terdakwa tersebut, dihukum dengan rata-rata hanya 3 tahun 6 bulan penjara. Mirisnya, 2 terdakwa diantaranya justru diganjar dengan hukuman bebas, yakni, Andri Wibawa dan M Totoh Gunawan.

TREN VONIS 2021

# PART X

***Rekomendasi***

# Kejaksaan dan KPK

- APH harus menggunakan perspektif pemulihan kerugian keuangan negara saat menuntut pelaku korupsi dengan memasukkan pasal anti pencucian uang dalam surat dakwaan.
- APH harus mempertimbangkan eksistensi Pasal 52 KUHP sebagai alasan memperberat tuntutan jika pelaku berasal kalangan ASN atau bahkan pejabat publik.
- APH harus menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, seperti politik jika terdakwa berasal dari klaster politik, mulai dari anggota legislatif, kepala daerah, atau pejabat publik lainnya dan hak sebagai ASN jika kemudian terdakwa bekerja sebagai ASN.
- APH harus merevisi pedoman penuntutan untuk mengatur lebih lanjut dampak korupsi dan latar belakang pekerjaan terdakwa sebagai alasan memperberat hukuman. Selain itu, pedoman penuntutan juga mesti menyorot seluruh tindak pidana korupsi agar disparitas tidak menjadi isu berulang setiap tahunnya. Substansi pedoman penuntutan diharapkan juga mencakup seluruh aspek, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, diantaranya, pemenjaraan, pengenaan denda, dan pidana penjara pengganti.
- APH harus memilih pasal tuntutan dengan spektrum hukuman maksimal, mulai dari Pasal 2 UU Tipikor jika korupsinya berkaitan kerugian keuangan negara maupun Pasal 12 UU Tipikor jika korupsinya berkaitan dengan tindak pidana suap.
- APH harus memastikan eksekusi putusan yang berkaitan dengan pemulihan kerugian keuangan negara dapat berjalan maksimal sekaligus dipublikasikan kepada masyarakat.
- APH harus mengevaluasi tuntutan-tuntutan bermasalah yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

# Mahkamah Agung

- MA harus mengevaluasi sistem informasi perkara, baik di tingkat pengadilan melalui SIPP maupun Direktori Putusan MA. Bahkan, jika dibutuhkan, penerapan sanksi administratif terhadap pejabat terkait penting untuk diatur dan ditegakkan sebagai upaya percepatan reformasi di internal MA.
- MA harus mencermati tren hukuman ringan kepada pelaku korupsi, salah satunya dengan mengidentifikasi hakim-hakim yang kerap melakukan hal tersebut. Jika ditemukan adanya kekeliruan, MA mengevaluasi kinerjanya dengan tolak ukur objektif.
- MA harus menyusun pedoman sebagai tolak ukur majelis hakim saat menguraikan alasan memperingan dan alasan memperberat hukuman terdakwa.
- MA harus lebih gencar mensosialisasikan PerMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Sekaligus mengevaluasi secara berkala hakim-hakim yang melenceng dari aturan tersebut saat memutus suatu perkara.
- MA harus mulai menyusun pedoman pemidanaan bagi tindak pidana korupsi di luar kerugian keuangan negara.
- Bawas MA harus bertindak aktif untuk melihat dan mencermati hakim-hakim yang kerap menghukum ringan terdakwa korupsi dengan pertimbangan-pertimbangan ganjil.
- MA harus menyusun pedoman pemidanaan untuk penjatuhan hukuman tambahan pidana penjara pengganti agar disparitasnya bisa diminimalisir.
- MA harus menyerukan urgensi pencabutan hak politik bagi terdakwa yang berasal dari klaster politik, mulai dari anggota legislatif, kepala daerah, atau pejabat publik lainnya.
- MA harus mencermati fenomena pemotongan hukuman melalui peninjauan kembali. Jika syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi, maka proses hukum luar biasa tersebut harus ditolak.

Komisi Yudisial harus aktif mengamati dan menginvestigasi persidangan-persidangan korupsi yang menarik perhatian publik. Selain itu KY juga mesti melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan bermasalah.

## Pemerintah dan DPR

- Pemerintah dan DPR harus segera mengundang regulasi-regulasi yang mendorong percepatan pemberantasan korupsi. Mulai dari revisi UU Tipikor, RUU Perampasan Aset, dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
- Pemerintah selaku atasan administratif aparat penegak hukum dan DPR harus mengevaluasi secara berkala pimpinan lembaga penegak hukum dengan mendasarkan kinerja dalam proses penegakan hukum.

Terima kasih